

PEMIKIRAN TENTANG PENJERNIHAN SEJARAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH
1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PEMIKIRAN TENTANG PENJERNIHAN SEJARAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH

1985

Penyunting :

Drs. Anhar Gonggong

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Terbitan buku Kesadaran Sejarah dan Penjernihan Sejarah berupa dua kumpulan kertaskerja para ahli sejarah dalam Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah (PPKS). Kertaskerja dalam kegiatan seminar dan penataran dirasakan sangat perlu diterbitkan supaya dapat diketahui dalam kalangan lebih luas, bukan hanya karena memuat hasil pemikiran para sarjana yang berasal dari pelbagai instansi, namun juga karena setiap seminar pada hakekatnya perlu disebarluaskan hasilnya. Dengan demikian dapat dilakukan informasi merata mengenai kegiatan-kegiatan proyek seperti Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah ini.

Saya berharap besar, bahwa terbitan ini dapat mencapai tujuan dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan proyek maupun terbitannya.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam bidang kesejarahan ternyata sangat rumit, namun sejarah tetap ramah dan terbuka kepada setiap orang.

Dalam upaya memahami berbagai masalah kesejarahan itu Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menerbitkan hasil kegiatan yang dilaksanakannya selama ini berupa pelbagai wawasan pikiran yang pernah dikemukakan dalam pelbagai kertaskerja yang disampaikan pada pertemuan yang diadakan oleh Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.

Di samping itu juga disertakan dalam publikasi ini hasil observasi di pelbagai tempat di seluruh propinsi di Indonesia; khususnya yang menyangkut buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMTA.

Mudah-mudahan publikasi ini akan berguna bagi masyarakat, sehingga pengetahuannya tentang masalah-masalah kesejarahan makin bertambah.

Kepada semua pihak yang telah memperlancar kegiatan-kegiatan Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 1986

Pemimpin Proyek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. Anhar Gonggong', written in a cursive style.

Drs. Anhar Gonggong

Nip. 130321407.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. Perjernihan Sejarah, oleh: Dr. T. Ibrahim Alfian . . .	1
II. Penjernihan Sejarah, Apa, Mengapa, Bagaimana oleh: A.B. Lapian	7
III. Beberapa Masalah Penjernihan Sejarah, oleh: Dr. Ayatrohaedi	15
IV. Penjernihan Sejarah Sebagai Sarana Peningkatan Kesadaran Sejarah, oleh: R.Z. Leirissa	21
V. Upaya Penjernihan Sejarah Daerah Sulawesi Selatan, oleh: Dr. Mukhlis	32
VI. Penjernihan Sejarah, oleh: Drs. Saleh A. Djamhari .	46
VII. Metode Penelitian, oleh: Dr. Andre Hardjana	50
LAMPIRAN	66

PENJERNIHAN SEJARAH

DR. T. Ibrahim Alfian

Penjernihan Sejarah kalau kita lihat yang faktual memang relatif dapat dianggap agak mudah jikalau ada sumber. Akan tetapi Penjernihan Sejarah akan interpertasi atau analisis Sejarah memang lebih sulit. Oleh karena belum ada tempat tegak dan belum mendayung tampak. Berdasarkan kedua arah pandangan inilah saya ingin membicarakannya.

Ada asumsi bahwa sejarah sebagai pertulisan adalah tidak jernih atau tidak sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi (*history as past actuality*) menimbulkan upaya penjernihan sejarah. Upaya ini sudah lama dilakukan orang dan akan dilakukan orang secara terus menerus. Lorenzo Valla seorang humanisme Italia pada tahun 1440 mengumumkan hasil penelitiannya bahwa *Indonesia of quartain* yang berabad-abad lamanya, yang dianggap autentik dan kredibel adalah palsu.

Upaya menjernihkan sejarah atau menulis kembali mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa yang lampau, antara lain adalah karena tiga hal:

1. Penemuan fakta baru dari sumber-sumber yang belum ditemukan orang sebelumnya.

2. Adanya kesalahan-kesalahan atau kurang sempurnaan hasil karya penulis sejarah yang telah ada.
 3. Adanya interpretasi baru terhadap fakta yang telah dikenal.
- Saya akan membicarakan terlebih dahulu dari butir yang nomor tiga, yaitu mengenai adanya interpretasi baru terhadap fakta yang telah ada.

Setiap generasi bisa saja mengajukan pertanyaan yang berbeda terhadap masa lampainya sesuai dengan interpretasi atau persepsi atau makna yang diberikannya terhadap masa lampainya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan inilah kita akan menyeleksi sumber-sumber dan menyusun fakta serta merangkainya serta menyajikannya untuk memberi jawaban yang tidak lepas dari pada konteks sosial budayanya. John Dewey dalam makalah *Historical Judgement* yang dihimpun dalam *Hans Mujerhoff, the Philosophy of History in our time* mengatakan bahwa: "*Historical inquiry is an affair of selection and arrangement, and is controlled by the dominant problems and conceptions of the culture and period in which it is written*".

Jadi pokok hal yang ditulis oleh seseorang penulis sejarah seperti dikatakan oleh Arthur Lovejoy sesuatu ditentukan oleh yang menarik hati atau interistingness bagi si penulis sejarah itu sendiri atau menarik bagi beberapa orang lain. Jika demikian tidaklah mengherankan apa yang dikatakan oleh F.J. Furners bahwa ada sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah objektif adalah peristiwa itu sendiri, sedangkan sejarah subjektif adalah konsepsi manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi apa yang telah terjadi dari masa yang lampau itu.

Sejarah objektif oleh setiap orang atau setiap generasi dapat dilihat dari pelbagai sudut pandangan. Dengan berbagai interpretasi sesuai dengan sikap hidupnya atau pendekatannya atau orientasinya masing-masing. Oleh karena itu pandangan terhadap peristiwa yang telah terjadi itu dapat diberi predikat relatif seperti yang telah disinggung, selalu pula terjadi orang

perseorang terjadi selama hayatnya merubah pandangannya dari yang dianggapnya kurang jernih kepada yang dianggapnya lebih jernih, dari fahamnya yang tidak diredhai oleh Tuhan kepada yang dirasanya diredhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Orang dapat merubah atau menyempurnakan konsepnya, pandangannya, keyakinannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya, pengalaman-pengalaman yang dilaluinya dan pengetahuan yang diperolehnya.

Dalam pidato hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Republik Indonesia membagi tingkatan Revolusi Indonesia atas:

Tahun 1945 – 1950 periode revolusi fisik.

Tahun 1950 – 1955 periode survival.

Tahun 1956 – dst. periode investment.

Kemudian dalam pidato hari Proklamasi 17 Agustus 1963, Presiden membagi Revolusi Republik Indonesia sebagai berikut:

Tahun 1945 – 1950 periode survival I

Tahun 1950 – 1962 periode survival II

Kita perhatikan pula buku, sejarah mengenai Indonesia yang ditulis oleh sejarawan Belanda Vlekke dalam *Geschiedenis van den Indischen Archipel*, hal 92 pengarang ini memasukkan dalam dalam catatan bukunya butir-butir sebagai berikut :

1. "Bricht aan de New York Times van Australie op 5 September 1945, Top Dutch officials say it may take several generations to implement Queen Wilhelmina's pledge" (Van der Plas): "It is beyond question that the Indies will have commenwealth status but several more generations must, before they can do without werstern assistance the 70 millions we not yet adequately introduced to modern civilization".
2. *Nusantara History of Indonesian* karya Vlekke dengan berkata pengantar 1958, 1961, bahagian yang dikutip diatas sudah tidak ditemukan lagi.

Dalam buku yang disunting oleh Elain McKey, *Studies in Indonesian History*, 1976, yang ditujukan untuk pelajar SMA di Australia (*High School Certificats*) dan juga untuk mahasiswa, undergraduates di situ ada tulisan Subardi menyebutkan bahwa Pasai masuk Islam tahun 1298 M. Tentang hal ini tidak tahu kita dari mana sumber yang diambil, oleh Soebardi, tetapi dalam buku-buku sejarah yang ada di Indonesia tidak kita temukan angka tahun seperti ini. Kalau kita cari sumber lain, maka Annalen dinasti Juan; ada disebutkan bahwa Malikul Saleh Raja Pasai yang pertama diludahi mulutnya oleh Syeh Ismail. Itu sejak 1282 artinya 10 tahun sebelum Marcopolo mengunjungi Samudra. Ia telah mengizinkan utusannya pergi, mengirimkan utusannya pergi ke Ceylon, yang terletak di pantai barat India; jadi dia bertemu dengan duta negeri Cina. Jadi sekurang-kurangnya Samudra sudah Islam sejak tahun 1282.

Catatan yang lain dari Snouck Hugronje, mahaguru Universitas Leiden, menulis bahwa pengarang hikayat perang Compeni itu Tengku Dukarim berasal dari Gelumpangdua (200 km dari Banda Aceh). Akan tetapi setelah kita pelajari karya Tengku Dukarim yang terdapat di Perpustakaan Universiteit Leiden, Dukarim bukan berasal dari Gelumpangdua akan tetapi dari Ketapang dua, yang cuma 7 km dari Kotaraja (Banda Aceh).

Jadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam buku sejarah yang kita sebutkan *hardfact*, memang relatif agak mudah asalkan kita dapat menemukan sumber-sumber sejarah yang autentik dan kredibel yang ada kaitan dengan masalah yang akan kita bincangkan. Fakta sejarah tidak lain adalah satu statement yang diperoleh dari sumber autentik dan kredibel melalui penyajian kritis. Ini merupakan dasar dari interpretasi sejarah.

Adapun fakta ini dapat berubah, kalau kita temukan sumber-sumber kontemporer yang belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya, maka melalui penyajian kritis sumber tadi dapat memberi sumber-sumber informasi yang lebih akurat dari

pada yang sebelumnya. Maka yang kita terima yang terakhir inilah. Ditemukannya sumber yang belum pernah dijamah sebelumnya. Untuk keperluan penulisan sejarah dan dipergunakannya sumber-sumber itu untuk mengungkapkan berbagai aspek Sejarah Nasional juga dapat mengubah Historiografi Indonesia. Prof Dr. Sartono Kartodiredjo misalnya, menggunakan sumber-sumber primer di Arsip, membuat kajian mengenai pergerakan sosial di Jawa pada abad ke-19, dan ini tertuang dalam bukunya *"Protes Movement in Rural Java, 1973*. Hasil studinya ini terpantul dalam buku Sejarah Nasional jilid IV, yang mengungkapkan adanya gerakan Ratu Adil, gerakan sekte keagamaan dan gerakan-gerakan Serikat Islam di pedesaan.

Usul atau rekomendasi yang telah diungkapkan oleh teman sejawat mengenai masalah majalah oleh Pak Abdurachman, Pak Leiressa dan juga mengenai buku-buku sejarah yang ada oleh Pak Tashadi. Jadi perlulah proyek ini mempelajari buku yang dipakai orang mengenai sejarah dan saya kira yang relatif agak mudah ialah dengan memperhatikan apa yang terdapat kesalahan-kesalahan elementer dari 4 W itu, yaitu *Who, Where, When* dan *What*. Dan kemudian disampaikan secara baik kepada penulis dan penerbit agar dalam penerbitan berikutnya dapat diperbaiki dan sebutkan halamannya. Bahwa ini mengenai masalah Sejarah yang kontroversial yang sangat banyak dan berikan petunjuk.

Dari berbagai peristiwa berskala nasional atau lokal sampai kini perlu dijernihkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini memang sangat penting. Karena itu menyambung usul adanya majalah atau boleh juga dipergunakan bulletin. Kalau tidak majalah sewaktu-waktu bisa diterbitkan untuk memuat pertanyaan dan jawaban yang lebih jernih. Sudah barang tentu dalam hal ini bersifat lebih aktual. Saya teringat di Kuala Lumpur, ada majalah *Dewan Bahasa* namanya. Pada akhir halaman di belakang dalam majalah itu ada rubrik yang memberikan kesempatan kepada warga Malaysia untuk bertanya mengenai sejarah. Oleh redaksi *Dewan Bahasa* itu dikirim ke Univer-

sitas Malaya atau universitas Kebangsaan Malaysia untuk dimin-takan jawabannya yang tepat. Dosen-dosen ini diberikan hono-rarium, kalau tak salah untuk jawaban yang singkat untuk satu pertanyaan diberikan dua puluh dollar atau ringgit Malaysia, dan kalau jawaban itu panjang dua puluh lima dollar.

Kalau proyek ada uang barangkali bisa dikirimkan ke universitas Indonesia untuk dimintakan tolong atau ke Arsip. Jadi barangkali tidak semua staf Pimpro (Pak Anhar) menguasai bahasa Belanda. Kalau ada pertanyaan bersumber bahasa Belan-da ada kemungkinan jurusan Sejarah Universitas Indonesia atau di LIPI bisa menjawabnya dan tentunya diberikan imbalan yang memang diperlukan.

PENJERNIHAN SEJARAH

Apa, Mengapa, Bagaimana ?

A.B. Lopian, LRKN-LIPI

Pertama-tama kami minta maaf, karena persiapan kami untuk membicarakan masalah ini sangat kurang sehingga kami tidak dapat menyajikan suatu makalah tertulis, langka dengan referensi sebagaimana mestinya. Pembicaraan ini bersifat *extempore*, jadi hanya berdasarkan atas pengetahuan dan pemikiran seadanya saja, belum bisa mengeceknya dahulu dengan buku-buku referensi yang relevan tentang masalah ini.

Sebagai titik tolak pembicaraan, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan elementer yang lazim dikemukakan setiap kali kita menghadapi problema sejarah, yakni pertanyaan: *who, what, when, why, how, – siapa, apa, bilamana, mengapa, bagaimana?* Di sini jawaban terhadap pertanyaan *who* (siapa) dan *when* (bilamana), menurut hemat kami, sudah jelas, atau lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, khusus Proyek Pembinaan Kesadaran dan Pembinaan Sejarah yang disertai tugas untuk menangani masalah ini. Mereka inilah yang menen-

tukan siapa yang akan melaksanakan "penjernihan" sejarah dan kapankah usaha ini harus mulai dilaksanakan.

Kami kira pertanyaan *why* (mengapa) juga sedikit banyak telah ada jawabannya. Sebab dengan mengadakan proyek yang bertujuan untuk "menjernihkan" sejarah, sudah tentu para pemrakarsa sudah mempunyai gagasan dan wawasan sendiri tentang rationale *mengapa* kita harus mengadakan penjernihan sejarah. Dan memang hal ini telah dijelaskan tadi oleh Dr. S. Budhisantoso dan Bapak Sutrisno Kutoyo, yakni bahwa scope atau ruang lingkup dari usaha "penjernihan" sejarah adalah lebih luas dari pada usaha "penelitian" sejarah. Direktorat ini seringkali menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat umum maupun dari instansi-instansi Pemerintah tentang masalah-masalah kesejarahan. Jadi dengan demikian bagi Direktorat sebenarnya sudah jelas mengapa harus ada penjernihan sejarah. Sebab ternyata ada hal-hal yang dianggap "keruh", yang masih belum jelas dalam gambaran sejarah dan pengetahuan kesejarahan di kalangan masyarakat umum. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita dapat menarik alasan-alasan kuat untuk membuat definis operasional tentang mengapa kita harus mengadakan penjernihan terhadap kekeruhan yang merupakan keprihatinan kita bersama.

Kekeruhan ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari kesalahan kecil-kecil sampai ke distorsi yang parah. Ada yang disebabkan oleh ketidaktahuan, jadi yang terjadi dengan tidak disengajakan. Tetapi ada pula yang malahan dibuat dengan sengaja untuk memaksakan suatu visi sejarah berdasarkan suatu pandangan tertentu. Hal-hal demikianlah yang perlu diidentifikasi dahulu baru kita bisa melangkah kepada penjernihan.

Jadi kita sekarang sudah tiba pada pertanyaan berikut, yakni *apa* yang harus dijernihkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Direktorat sebenarnya sudah mempunyai banyak bahan dari praktek berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diterima dari luar. Yang kami ketengahkan pada kesempatan

ini adalah beberapa contoh saja berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kami jumpai selama ini. Misalnya, citra sejarah yang sering kita lihat atau dengar dalam tulisan maupun ucapan umum, bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim sedangkan Majapahit adalah kerajaan agraris, suatu kekeliruan besar. Bagaimana Majapahit dapat memperluas kekuasaannya di Nusantara kalau hanya sebagai kekuatan agraris? Kita boleh mempersoalkan luas wilayah kekuasaannya dan sampai di mana efektivitas kekuasaan itu. Juga masih dapat dipertanyakan apakah daerah-daerah yang disebut Mpu Prapanca dalam Nagarakertagama memang dikuasai, atau hanya secara nominal saja, ataupun hanya di-claim secara unilateral. Namun, kita tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa Majapahit telah menyelenggarakan hubungan maritim dengan banyak tempat di kepulauan Indonesia, malahan sampai ke tanah daratan Asia. Oleh sebab itu tidak dapat kita memasukkannya dalam kategori "negara agraris" saja. Mungkin basis utamanya adalah agraris, tetapi segi maritimnya pasti telah memainkan peranan yang besar pada waktu itu.

Kemudian mengenai masa keruntuhan Majapahit. Masih banyak terdengar ucapan-ucapan bahwa kedatangan orang Portugis lah yang menyebabkan kerajaan Majapahit jatuh. Malahan ada yang mengatakan bahwa VOC yang menjadi biang keladinya. Pada hal dengan membaca text-book yang sederhana saja kita sudah dapat mengetahui bahwa pernyataan demikian sangat keliru. Apalagi kalau menggunakan *commonsense*, akal sehat, dan mengamati kronologi saja kita sudah bisa melihat bahwa itu tidak masuk akal. Menurut perhitungan tradisional, Majapahit jatuh pada tahun 1400 Saka (yaitu tahun 1478 M), walaupun ada teori yang mengatakan bahwa sampai 1525 A.D; masih ada sisa-sisanya di pedalaman. Tetapi orang Portugis pada waktu itu baru berada di Malaka, mereka tidak pernah menguasai pulau Jawa. Sedangkan Belanda baru *mengunjungi* pulau Jawa untuk pertama kali pada tahun 1596.

Ini hanya dua dari sekian banyak citra sejarah yang keliru. Banyak mitos lama yang masih tertanam dalam anggapan masyarakat umum yang sukar dihilangkan karena telah menjadi semacam "keyakinan". Ada citra yang diperoleh karena ketidaktahuan atau karena kurang pengetahuan. Ada pula yang lahir karena memang datanya kurang sehingga dibuatlah rekonstruksi yang bagus-bagus; Banyak pula citra sejarah terjadi karena diadakan simplifikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, dalam retorika pidato, sering dipakai gambaran sejarah yang sangat disederhanakan sehingga masyarakat bisa mendapat gambaran yang kurang tepat. Maka terjadilah mitos-mitos baru.

Memang, mitos mempunyai fungsi yang penting dalam memupuk kesatuan dan solidaritas suatu bangsa, dan hal ini dikedukakan di mana pun di dunia. Yang sering digunakan untuk mengajak orang banyak memperjuangkan sesuatu, misalnya, dengan memberi gambaran masa lampau yang suram, dan dengan mengajak masyarakat untuk memperjuangkan perbaikan nasibnya (perjuangan kemerdekaan dari kekuasaan penjajahan, perjuangan hak rakyat terhadap establishment yang berkuasa, dan sebagainya), maka dijanjikan suatu masa depan yang cemerlang dimana tidak ada lagi penderitaan. Banyak contoh demikian kita jumpai dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa.

Citra sejarah yang sederhana memang diperlukan, terlebih dalam pendidikan sekolah dasar, yakni pada tingkat dasar dari proses sosialisasi anak-anak. Semakin ia bertumbuh baik fisik maupun secara spiritual dan psikologis, semakin kompleks pula pelajaran yang diberikan kepadanya. Demikian pula pelajaran sejarah. Kalau dahulu ia melihat peristiwa sejarah secara hitam-putih, sedikit demi sedikit ia harus menyadari bahwa di antara dua kutub yang ekstrim, hitam dan putih, terdapat nuansa-nuansa yang mewarnai kontinum itu.

Proses pengenalan dunia sekeliling kita niscaya berlangsung secara bertahap. Mulai dari yang sederhana pada masa kanak-

kanak, kemudian dengan pengajaran pendidikan sampai kepada kenyataan yang serba kompleks. Dunia pendidikan memang menginginkan adanya kepastian-kepastian yang diajarkan kepada anak-anak, meskipun kita tahu bahwa sesungguhnya dalam kenyataan yang pasti itu sangat terbatas. Ilmu pasti pun merupakan sesuatu yang *relatif*, terlebih sesudah dijelaskan oleh Einstein. Hanya, dahulu ketidakpastian dari ilmu pasti ini baru dibahas pada tingkat pendidikan universitas. Kini sistem pendidikan cenderung mulai mengajarkan tentang relativisme dalam ilmu pengetahuan yang dianggap pasti itu, pada tingkat sekolah menengah atas. Kalau demikian halnya dengan ilmu pasti, bagaimana dengan pendidikan sejarah yang bersifat *software*? Pada tingkat manakah kita boleh mulai mempertanyakan dan mempersoalkan "kebenaran-kebenaran" dalam sejarah? Hal ini perlu mendapat perhatian para penyusun kurikulum sejarah.

Dengan ini kita sebenarnya sudah tiba pada soal bagaimana kita harus mengadakan penjernihan sejarah. Yang pokok adalah meneliti semua buku sejarah yang sedang dipakai dan yang beredar, baik yang text-book maupun yang ilmiah yang populer. Karangan-karangan ilmiah mendapat sorotan dari kalangan ilmiah, dikritik oleh "pers", jadi dengan sendirinya selalu ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dan untuk menyempurnakan karangan bersangkutan. Tetapi yang belum dilakukan adalah karangan populer, semi-populer, dan buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah-sekolah. Buku yang populerpun, jika menceritakan hal yang historis, tidak boleh bertentangan dengan fakta sejarahnya. Fantasi dan imajinasi boleh memainkan peranan, tetapi hal yang anakronistik, apalagi kalau tidak sesuai dengan sumber sejarah, bisa merusak citra sejarah pada anak-anak dan pelajar.

Masalah lain adalah pemaparan hal-hal yang kontroversial. Sudah tentu sebuah buku pelajaran hendaknya menghindari hal demikian. Nanti tahap kedewasaan yang lebih matang barulah masalah kontroversial diberikan sebagai bahan pelajaran.

Dalam kategori ini termasuk pula masalah antar daerah, antar suku bangsa, antar kelompok, khusus yang terbentuk konflik. Dalam hubungan ini ada baiknya apabila kita belajar dari penulisan sejarah negara-negara lainnya. Dalam setiap sejarah suatu bangsa ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan dua atau lebih kelompok dalam suatu konflik, malahan berperang satu dengan lainnya. Misalnya, di Inggris ada *Wars of the Roses* antara keluarga Lancaster dan York, di Amerika Serikat ada perang Saudara antara Utara dan Selatan, di Jepang ada perang antara Heike (keluarga Taira) dan Genji (keluarga Minamoto). Ada baiknya apabila parapenulis text-book belajar dari penulisan buku-buku sejarah negara-negara tersebut, terutama yang menyinggung konflik intern di dalam negerinya. Tentu saja sentimen kedaerahan, di mana pun, akan selalu ada, namun hendaknya kisah sejarah diceritakan sedemikian rupa sehingga tidak berat sebelah, lebih-lebih lagi jika tidak sesuai dengan kenyataan historis berdasarkan sumber-sumber yang ada. Bagaimanapun juga, semua kelompok yang saling berperang itu merupakan unsur-unsur bangsa yang sama-sama membentuk bangsanya. Kita melihat, bagaimana Spanyol pada zaman Franco telah menyelesaikan masalah Perang Saudara yang dimulai pada tahun 1933; semua yang gugur dalam perang ini, kawan dan lawan, dimakamkan bersama-sama dalam satu mausoleum besar di *Valle de los Caidos* (Lembah Bagi Yang Gugur). Dengan demikian tidak ada perbedaan penilaian terhadap kedua belah pihak yang saling bunuh-membunuh itu.

Di samping konflik dalam negeri, persengketaan antar bangsa pun perlu mendapat sorotan usaha penjernihan sejarah. Kita tidak menghendaki suatu pembinaan *chauvinisme* di mana bangsa dan negara sendiri dianggap yang paling unggul dan paling baik di seluruh dunia. Dalam perkembangan nasionalisme, di dunia Timur maupun di dunia Barat, hal demikian memang pernah terjadi; sisa-sisanya bahkan masih terasa sampai sekarang. Umpamanya, citra orang Perancis, diperoleh dari kisah sejarah konflik Perancis-Jerman yang berlangsung berabad-

abad lamanya dan sampai melibatkan mereka dalam dua perang dunia. Konflik ini malahan nyaris dilestarikan kalau tidak di buat revisi atau penulisan kembali dari text-book sejarah di masing-masing negara. Dengan menulis kembali buku pelajaran sejarah maka citra yang hidup di negara yang satu tentang negara yang lain bisa dikembalikan ke dalam proporsi yang wajar.

Dengan kata lain, kita dapat belajar dari historiografi di negara-negara lain tentang bagaimana menampilkan negara asing itu dalam penulisan buku sejarah kita. Antara Belgia dan Belanda dahulu ada pertentangan besar, dan Belgia pernah membrontak terhadap kekuasaan Belanda, namun kini mereka dapat hidup rukun dalam kesatuan Benelux bersama tetangganya Luxemburg. Bahwa masalah seperti ini masih ada saja, kita telah lihat beberapa waktu yang lalu ketika ramai diper-masalahkan penulisan buku sejarah Jepang yang mengisahkan tentang invasi dan pendudukan Jepang di negeri Cina.

Kitapun mau tak mau akan dihadapkan dengan persoalan serupa itu. Bagaimana mengisahkan politik kolonial Belanda, pendudukan Jepang, konfrontasi dengan Malaysia, dan banyak hal lain lagi dalam percaturan politik antar-bangsa? Penulisan text-book sejarah internasional maupun nasional di Indonesia memerlukan pemikiran-pemikiran yang diketengahkan diatas.

Lain lagi soalnya tentang citra Indonesia di mata bangsa-bangsa lain yang mereka peroleh dari text-book mereka sendiri. Kalau kita lihat misalnya, beberapa buku pelajaran di luar negeri mengenai sejarah Indonesia, akan nyata bahwa penulisan buku itu didasarkan atas buku-buku yang dikenal dahulu, ditulis oleh orang asing. Sejarah Indonesia sebelum 1945, misalnya, lebih banyak merupakan kisah pemerintahan gubernur-jenderal Hindia-Belanda, pada hal kisah semacam ini sudah lama kita tinggalkan. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita pula untuk mengusahakan perobahan pandangan serupa itu. Misalnya dengan mengadakan kerjasama dalam penulisan

kembali text-book sejarah masing-masing. Khususnya antara bangsa-bangsa ASEAN kita perlu saling bertemu untuk bertukar pikiran mengenai penulisan kembali buku-buku sejarah masing-masing. Citra yang bagaimana harus kita miliki tentang sejarah Thailand, misalnya, dan sebaliknya, citra yang bagaimana kita kehendaki yang diperoleh orang Muangthai tentang sejarah Indonesia?

Sebagaimana telah diketengahkan tadi, text-book sejarah (terlebih pada tingkat pendidikan dasar) harus bisa memberi citra yang wajar mengenai masalah tertentu dengan menghindari seberapa mungkin soal-soal yang kontroversial. Perlu diberi fakta-fakta yang pasti, sedangkan hal yang masih berupa hipotesa hendaknya disebut dengan sangat hati-hati. Tetapi text-book pun perlu ditinjau kembali dari masa-kemasa (misalnya sekali dalam 7 @ 10 tahun) untuk memperbaiki visi dan pandangan yang ternyata salah. Sebab selama kurun waktu itu penelitian sejarah berjalan terus, sehingga pada data baru yang penting yang bisa merobah pandangan atau citra sejarah yang dianut sebelumnya. Di luar negeri ada peraturan kearsipan yang menutup arsip (yang bersifat rahasia) untuk suatu waktu tertentu. Misalnya ada negara yang melarang terbukanya arsip rahasia selama 75 tahun, ada yang membatasinya sampai 50 tahun atau 30 tahun saja. Betapapun, dengan ketentuan demikian maka setiap tahun ada sejumlah berkas arsip yang sudah boleh dibaca oleh umum dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian sejarah. Dengan demikian pengetahuan kita tentang masa lampau setiap tahun bertambah, sehingga dalam waktu 7 @ 10 tahun sudah ada cukup bahan untuk meninjau kembali historiografi yang dimiliki sampai waktu itu. Dengan mempunyai lebih banyak bahan, maka para sejarawan dapat mengadakan retrospeksi dan introspeksi yang lebih mendalam. Maka dengan sendirinya perspektif sejarah dapat diperkaya dengan dimensi-dimensi yang baru.

BEBERAPA MASALAH PENJERNIHAN SEJARAH

Ayatrochaedi

1. Sejumlah buku *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa* yang disusun "telah sesuai dengan kurikulum dan penataran PSPB-SD" dan diterbitkan di beberapa kota (Medan, Semarang, Malang, Surabaya) akhirnya terpaksa ditarik dari peredaran karena ternyata "tidak sesuai dengan wawasan mengenai PSPB". Sungguh suatu hal yang menarik, karena dari kenyataan itu tergambar belum adanya kejernihan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *pendidikan sejarah perjuangan bangsa* itu.

Betapa tidak menarik: penataran yang diselenggarakan pemerintah untuk para guru PSPB dan menghabiskan entah berapa puluh (atau ratus?) juta rupiah itu ternyata tidak sesuai dengan jiwa keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1983. Masalahnya menjadi menarik, karena setidaknya-tidaknya akan timbul pertanyaan, mengapa pemerintah melakukan penataran yang salah satu hasilnya berujud buku-buku yang kemudian "tidak benar" itu? Siapa sebenarnya yang menafsirkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu sama dengan *sejarah bangsa yang menitikberatkan segi perjuangan yang patut diteladani para anak didik?*

Memang sudah sejak awal timbul tanda tanya, apa bedanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa dengan pelajaran sejarah, jika keduanya juga mengetengahkan Purnawarman, Airlangga, Gajahmada, Malikul-Salih, Nuku dan Pangeran Antasari misalnya. Sumber sejarah yang masih kurang mengenai tokoh-tokoh itu, misalnya akan mengakibatkan apa yang disampaikan dalam pelajaran sejarah praktis tidak berbeda dari apa yang diberikan dalam pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jika demikian, apakah bukan suatu pemborosan namanya, di samping kesia-siaan, menjejali murid dengan pengetahuan yang sama melalui dua mata pelajaran yang namanya berbeda? Mengapa hal itu sampai terjadi?

2. Orang Yogyakarta yang untuk pertama kalinya berkunjung dan kemudian tamasya di kota Bandung atau kota-kota lain di Jawa Barat, mungkin akan bertanya-tanya, mengapa di kota-kota tersebut tidak ada nama jalan Hayamwuruk, Majapahit, dan Gajahmada. Padahal, bukankah nama-nama itu merupakan milik nasional, dan karenanya sangat wajar jika ada nama jalan dengan nama-nama itu. Tidak apa-apa, karena orang Sunda yang berkunjung ke kota Yogyakarta pun tidak akan menemukan nama jalan Pajajaran atau Siliwangi di kota itu. Padahal, bukankah kenyataan menunjukkan bahwa kerajaan Pajajaran runtuh satu abad kemudian (1579) dari Majapahit (1478)? Peristiwa bubat yang terjadi pada tahun 1357 itulah yang mungkin umumnya akan dijadikan "kambing hitam" sehingga terjadi hal yang demikian itu. Dalam peristiwa itu, dan juga dalam berbagai peristiwa antar suku (tentu saja pada waktu semuanya itu masih antar bangsa!) yang lain, ada pertentangan pendapat dan juga sikap mengenai apa yang disebut *kebenaran*. *Kebenaran* buat orang Sunda ternyata tidak diakui oleh orang Majapahit, kebenaran orang Bugis ditolak oleh orang Makasar, kebenaran orang Minang ditampik oleh orang Batak. Bahkan ketika pada tahun 1956 dalam Kongres Pemuda Sunda di Bandung, utusan Sumedang mengusulkan kepada sidang agar Pangeran Kornel dari Sumedang diusulkan menjadi pahlawan nasional, serta

merta usul itu ditolak oleh utusan Cirebon. Masalahnya, calon pahlawan nasional orang Sumedang itu, yang dengan jantan membela rakyatnya ketika pembuatan jalan raya Anyer – Panarukan sehingga berani menyambut salam Daendels dengan tangan kiri, ternyata termasuk bupati yang ditugasi Belanda (bersama tiga orang bupati yang lain) menumpas perjuangan Bagus Rangin, pahlawan orang Cirebon. Nampak bahwa ketidakcocokan sikap mengenai kebenaran itu juga dapat terjadi dalam suatu (suku) bangsa. Mengapa hal itu sampai terjadi?

3. Dalam sebuah acara televisi, perwira yang bertugas di Museum Angkatan Udara Yogyakarta, dengan panjang lebar memberikan penjelasan kepada para pengunjung yang terdiri dari para murid sekolah dasar (acara anak-anak!). Sang perwira antara lain menyebutkan bahwa di Museum itu dipajang mereka yang pernah menjadi kepala staf TNI–AU.

Tanpa berusaha menjelaskan alasannya, sang perwira menyebutkan Kepala staf yang pertama, lalu *ketiga*, dan seterusnya. Mengapa kepala staf yang kedua, Omar Dhani, sama sekali tidak disinggunginya? Apakah memang sudah ada cara menghitung gaya baru di Indonesia ini, dari satu langsung ketiga?

Hal yang hampir sama terdapat dalam buku *Siliwangi* yang diterbitkan oleh Kodam itu beberapa tahun yang lalu. Ketika membicarakan nama mereka yang pernah menjabat sebagai Komandan Militer Kotabesar Jakarta Raya (KMBDR), ada satu nama yang mungkin menurut penyusun buku itu hanya pantas dicantumkan pada catatan kaki saja. Padahal tokoh lain disebutkan lengkap dengan masa jabatan dan apa yang dikerjakan selama menjadi komandan (kemudian panglima) di Jakarta itu. Penghilangan nama tokoh atau peristiwa sejarah itu mungkin sudah lama dimulai. Setidak-tidaknya, itulah yang dilakukan oleh Prapanca ketika ia menyusun *Nagarakertagama* (1365), yaitu (dengan sengaja) tidak menyebut-nyebut peristiwa Bubat yang ternyata berekor panjang itu. Mengapa hal itu sampai terjadi?

4. Dari ketiga butir yang dikemukakan itu nampaknya jelas bahwa dalam sejarah kita masih terdapat ketidak jernihan. Ketidakjernihan itu sekurang-kurangnya merupakan akibat dari tiga hal yang berbeda. Ketidakjernihan yang pertama pada dasarnya merupakan akibat dari tidak atau kurang jelasnya *embaran* (informasi) yang sampai. Pada gilirannya mungkin pula kekurangjelasan *embaran* itu hanya akibat dari kurang atau tidak jelasnya wawasan atau sekurang-kurangnya gagasan yang hendak disampaikan atau disebarluaskan itu. Jika saja sudah sejak awal dengan tegas dinyatakan bahwa pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu sebenarnya saudara kandung pendidikan moral pancasila, dan tidak punya hubungan darah dengan pelajaran sejarah (kecuali sebagian namanya: *sejarah*), tentulah tidak akan muncul penataran yang antara lain menghasilkan sejumlah buku yang salah sasaran itu.

Ketidakjernihan yang kedua pada dasarnya merupakan akibat dari belum mengendap dan meresapnya rasa berbangsa sebagaimana dicanangkan dalam Sumpah Pemuda. Rasa berbangsa Sumpah Pemuda itu rupanya baru berhasil dalam segi-segi yang nampak kolosal saja, tetapi tidak mencapai dasar watak dan harga diri suku bangsa yang ada. Dengan keadaan seperti itu, maka baik diajarkan maupun tidak diajarkan, peristiwa yang menyangkut hubungan antar (suku) bangsa itu akan sama saja hasilnya: rasa berbangsa hanya terdapat pada hal-hal yang bersifat menyangkut Indonesia sebagai satu kesatuan, sedangkan dalam masalah yang menyangkut hubungan antar (suku) bangsa, yang muncul justru rasa bangga sebagai warga suku bangsa. Ketidakjernihan ini kian ditunjang oleh pengajaran yang menyajikan tafsiran sepihak, misalnya bahwa "sumpah palapa" merupakan usaha untuk menyatukan nusantara. Jika yang dijadikan patokan Majapahit, hal itu tidak salah. Tetapi bagaimana jika patokan itu bukan Majapahit, malahan negara atau daerah lain yang hendak dipersatukan itu?

Pengagungan Majapahit sebagai salah satu negara kesatuan yang berkembang selama 200 tahun pun (1294–1478), tentu

saja sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Bukankah pada tahun 1292 di Sumatera sudah berdiri kerajaan Islam yang pertama? Mungkinkah kerajaan Islam masih bersedia mengakui kerajaan lain yang justru menjadi "musuh" agamanya?

Sama halnya dengan kebesaran Sriwijaya yang oleh Yamin dianggap sebagai negara kesatuan yang pertama di Nusantara. Bukankah ketika Sriwijaya mulai berperan (683), di Jawa Kalingga, dan kemudian Mataram? Bukankah kemudian di Jawa saling susul kerajaan-kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit yang "menguasai" Nusantara bagian timur sehingga sebenarnya Sriwijaya hanya "menguasai" Nusantara bagian barat saja? Mengapa Sriwijaya dianggap negara kesatuan, sedangkan Kediri tidak?

Ketidakjernihan yang ketiga nampaknya bersumber dari kesengajaan para tokoh dan pembuat sejarah yang kebetulan berperan dan berkuasa, dan ditunjang pula oleh sikap tertentu yang ada pada mereka. Peristiwa Bubat tidak termuat dalam *Nagarakertagama*, misalnya, sesuai dengan tujuan Prapanca menyusun naskah *sastra puja*. Untuk mengagungkan raja, disamping sebagai alat untuk memulihkan nama baiknya sendiri. Hal-hal yang menurut perkiraan akan merugikan baik raja maupun usaha pemulihan itu, secara sengaja disisihkan. Bahkan, sebuah potret detik-detik proklamasi yang katakanlah sudah dikenal di seluruh duniapun, dalam sebuah buku yang belum lama terbit mengalami "pengguntingan" pula: Tokoh Bung Hatta tidak nampak dalam potret yang dimuat dalam buku tersebut. Apakah hal itu tidak berarti mengurangi nilai peristiwa sejarah yang sebenarnya netral itu?

Belum lagi dari segi hal cipta, apakah hal itu tidak berarti melanggar undang-undang hak cipta, atau sekurang-kurangnya mengurangi jasa pemotret (satu-satunya) yang berhasil mengabadikan peristiwa terbesar untuk bangsa Indonesia itu?

5. Jelas kiranya bahwa semuanya itu memerlukan penjernihan. Penjernihan itu nampaknya meliputi berbagai segi yang

luas tetapi saling melengkapi itu. Ada empat penjernihan yang mungkin berkenan dengan usaha ini, yaitu penjernihan wawasan, gagasan, bahasan, dan tulisan sejarah.

Penjernihan *wawasan* benar-benar merupakan dasar untuk melakukan kegiatan di bidang sejarah yang lain. Wawasan yang masih mengambang, belum mantap, kabur dan karenanya menimbulkan tafsiran yang tidak mustahil saling bertentangan, harus menjadi sasaran utama usaha penjernihan ini. Dengan wawasan yang jernih dan mantap, harus jelas dinyatakan apa sebenarnya hakikat sejarah yang sesuai dengan atau untuk bangsa Indonesia. Sejarah untuk menjadikan orang arif, sejarah untuk masa depan, sejarah untuk pengambilan keputusan/kebijaksanaan, atau sejarah untuk sesuatu yang lain, misalnya, haruslah benar-benar dihayati dan kemudian diamalkan oleh bangsa Indonesia.

Penjernihan *gagasan* diperlukan agar wawasan yang sudah dijernihkan itu dapat diisi dengan hal-hal yang sesuai. Gagasan apa saja yang patut diterima kemudian dilaksanakan untuk mengisi wawasan sejarah untuk menjadikan orang menjadi arif, misalnya, mungkin berlainan dengan gagasan untuk mengisi wawasan sejarah untuk pengambilan keputusan.

Gagasan yang merupakan landasan operasional itu kemudian harus ditunjang oleh penjernihan *bahasan* atau *ulasan*. Membahas masalah satu atau dua dinasti yang berkuasa di Jawa sebelum abad ke-10 misalnya, haruslah disadari oleh keinginan untuk menyajikan tafsiran yang seobyektif mungkin. Karena sifatnya yang serba tafsiran, seharusnya semua tafsiran dapat diterima, tentu saja asalkan caranya menafsirkan itu jernih dan sesuai dengan akal sehat.

Akhirnya, semua penjernihan itu harus dituangkan dalam *tulisan* yang juga jernih. Sekarang tidak jarang tulisan sejarah yang terlalu banyak bumbu – dalam artian hal lain yang kurang relevan – sehingga justru menjadi tidak jelas. Di samping isinya, tulisan yang jernih juga seharusnya mudah diikuti, runtun, berimbang, lugas, sedangkan bahasanya sederhana.

PENJERNIHAN SEJARAH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KESADARAN SEJARAH

R.Z. Leirissa

Di antara sejumlah permasalahan yang muncul dalam historiografi (di sini saya gunakan istilah ini dalam pengertian yang diberikan oleh Harry Elmer Barnes, yaitu sejarah penelitian dan penulisan sejarah Indonesia), maka gejala-gejala yang memerlukan "penjernihan sejarah" mungkin merupakan suatu hal yang baru. Hal ini dikatakan baru terutama karena dalam perkembangan penelitian dan penulisan sejarah tersebut, soal-soal seperti itu jarang sekali ditemukan oleh seorang sejarawan profesional. Adalah suatu kebiasaan, terutama di negara-negara maju, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul karena kekeliruan-kekeliruan metodologis, dengan cara-cara akademik pula seperti melalui tulisan dalam majalah-majalah ilmu sejarah atau monografi dan disertasi. Di sini cara-cara penjernihan sudah "built-in". Tetapi, mudahlah dimaklumi apabila permasalahan ini sangat dirasakan mendesak oleh suatu instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri dalam masalah kesejarahan.

Dengan pernyataan terakhir tersebut, saya sama sekali tidak bermaksud memasukkan permasalahan ini dalam kebiasa-

an-kebiasaan yang terdapat dalam negara-negara totaliter, di mana sejarah merupakan kerangka pokok dari ideologi, serta suasana ilmu dan pengetahuan pada umumnya. Saya yakin, kita di Indonesia, yang mencoba melihat perkembangan bangsa dan bertindak sejalan dengan ideologi Pancasila, tidak akan menjuruskan sejarah pada kepentingan-kepentingan sedemikian. Dengan pernyataan ini pula saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan peranan sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mulai tumbuh subur di tanah air tercinta ini. Saya sekedar menafsirkan perlunya kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam "penjernihan sejarah" (yang akan saya uraikan lagi di bawah) yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena apabila kita melihat secara sepintas lalu pada istilah "penjernihan sejarah" tersebut, kita mudah saja terjerumus pada dugaan bahwa kita berhadapan dengan suatu otoritas yang berpretensi mempunyai hak untuk menentukan segala hal yang berhubungan dengan sejarah yang benar dan kesadaran sejarah yang tepat. Sepanjang pengalaman saya berkecimpung dalam kegiatan Proyek IDSN dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tersebut, kecenderungan ini nampaknya tidak ada.

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai gejala historiografi yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan "Penjernihan" tersebut, barangkali ada baiknya kita kembali kepada permasalahan-permasalahan serta perkembangan historiografi Indonesia sejak, katakanlah, tahun 1950. Sudah tentu ini suatu cara yang gampang saja untuk memahami persoalan-persoalan yang muncul dalam disiplin sejarah. Tetapi betapapun juga, ungkapan yang sudah cliché, yaitu memandang ke belakang untuk mendapat kejernihan mengenai keadaan sekarang dan patokan untuk tindak lanjutan, barangkali belum samasekali ditolak oleh semua sejarawan, termasuk sejarawan Indonesia. Sejumlah sejarawan, ahli filsafat, dan budayawan yang mengalami masa kreatifnya di tahun-tahun 1950-an itu sepakat, bahwa dalam masa itu se-

dang terjadi suatu perubahan dalam kegiatan kesejarahan di Indonesia. Di sini cukup disebut beberapa artikel dari de Graaf, Resink, Mohammad Ali, dan lain-lain yang beberapa tahun yang lalu malah pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia (sekali pun alih-bahasanya tidak dapat digolongkan berhasil). Di konstatir waktu itu bahwa di Indonesia terdapat tiga jenis sejarah yang masing-masing berlainan dalam isi, metode, persepsi, dan audience (kalau kata ini boleh kita turut pakai untuk menyebut para pembaca sejarah). Ada sejarah yang regiosentrik, ada sejarah kolonial, dan sejarah nasional yang wujudnya ketika itu sedang diperdebatkan dengan sengit pula. Sejarah regiosentrik yang tumbuh dalam "nasion-nasion lama" (untuk memakai suatu konsep yang sering digunakan untuk sistem sosial tradisional yang sering dalam historiografi dinamakan "kerajaan") rupanya ketika itu merupakan suatu genre yang masih hidup dengan alasan-alasannya sendiri. Selain itu, sejarah kolonial yang muncul bersamaan dengan munculnya negara *Nederlandsch-Indie* (sejak abad ke-19), juga masih terasa gemanya sekalipun sedang menghadapi "untergang"-nya. Dan, ketiga, sejarah nasional, yang sudah sering digembar-gemborkan sebagai sangat penting sejak masa pergerakan nasional itu, mulai dipikirkan secara lebih "ilmiah" dalam tahun-tahun 1950-an itu.

Permasalahan yang muncul dalam ketiga jenis sejarah tersebut sudah tentu bisa menimbulkan masalah penjernihan. Tetapi, berdasarkan kasus-kasus yang saya kenal, saya hanya akan mengambil contoh-contoh yang muncul dalam historiografi nasional saja.

Dalam tahun-tahun 1950-an dan 1960-an, tema-tema yang diteliti dan ditulis oleh sejarawan akademik dan non-akademik tidak banyak berbeda. Sejarah politik, perlawanan terhadap kolonialisme, merupakan tema-tema yang utama ketika itu. Sangat jarang muncul sejarah sosial, apalagi sejarah ekonomi. Suatu langkah yang baru barangkali, dicanangkan dengan munculnya desertasi dari Dr. Sartono Kartodurjo di tahun 1966. Tetapi tenden itupun baru nampak jelas di tahun-tahun 1970-an.

Disertasi tersebut bisa muncul dalam pertengahan 1960-an itu karena ditulis dan dipertahankan di luar negeri, dimana aliran sejarah semacam itu bukan barang baru.

Bahwa sejarah politik dan tema perlawanan serta kepahlawanan menjadi utama dalam periode tersebut di atas, dapat kita mengerti. Tema-tema itu sejalan dengan tema-tema "perjuangan" dari para pemimpin pergerakan nasional tersebut. Selain itu sebagian besar dari para cerdik pandai kita di masa itu mendapat pendidikan formalnya di sekolah-sekolah Belanda di mana tema-tema semacam itu dalam konteks sejarah kolonial, sangat umum. Selain itu, kita juga bisa tambahkan, bahwa tradisi sejarah politik pulalah yang dikenal dalam sejarah regio-sentrik yang jelas juga dikenal oleh para pemimpin pergerakan nasional. Jadi sejarah politik, penonjolan kepahlawanan, adalah hal yang lumrah.

Di masa kini tema-tema tersebut banyak digarap kaum awam. Pelbagai buku sejarah yang ditulis dan diterbitkan oleh pelbagai pihak dalam tahun-tahun 1970-an bisa membuktikan bahwa patriotisme dan kepahlawanan masih merupakan daya tarik dikalangan sebagian kaum terdidik Indonesia. Sudah tentu ada usaha-usaha untuk mengimbangi tulisan-tulisan yang lebih mendekati kaidah-kaidah ilmu sejarah, seperti umpamanya nampak dalam suatu kumpulan biografi yang pernah diterbitkan oleh LP3S. Dan, dengan sendirinya kegiatan dari IDSN juga menjurus kesana dengan cara mengerahkan orang-orang yang pernah mendapat pendidikan formal dalam bidang sejarah.

Tema-tema seperti sejarah pahlawan tersebut tetap bertahan dan menarik minat pembaca maupun penulis-penulis di kalangan dalam maupun luar universitas, karena memang sudah dikerjakan. Kita tidak perlu menguasai pelbagai konsep ilmu sosial yang lazimnya diperlukan untuk menggarap sejarah-sejarah dengan tema lain. Permasalahan yang pokok adalah mengungkapkan patriotisme dan kepahlawanan. Caranya terutama adalah memakai metode intuisi (*emphaty*), dan hampir setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar akan

nasib bangsa dan sejarahnya, menganggap diri mengetahui apa yang dinamakan kepahlawanan sehingga bisa melakukan langkah berat untuk memahami sumber-sumber sejarah melalui empathy tersebut.

Sudah tentu tema kepahlawanan itu menjadi demikian menarik karena suasana zaman kita memang menjungnya. Kepahlawanan adalah salah satu bagian dari sistem nilai dalam kebudayaan politik kita. Barangkali ini juga menyebabkan setiap orang menganggap bisa menggunakan metode empathy tersebut. Bahwa suasana zaman jelas menentukan arah historiografi, akademik ataupun non-akademik, agaknya tidak perlu dibentangkan lagi di sini.

Tetapi, kedua faktor tersebut, anggapan bahwa empathy dapat dengan mudah dipakai dan suasana jaman, tidak merupakan faktor-faktor utama yang menimbulkan perbedaan-perbedaan faham yang memerlukan "penjernihan". Agaknya, satu faktor lain yang sangat penting adalah kebanggaan. Dalam pengertian ini saya masukkan bias yang terkandung dalam diri penulis sejarah, ataupun yang terdapat dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam menilai seorang tokoh ataupun peristiwa tertentu. Kebanggaan seperti ini memang sudah memburuk menjadi perasaan superioritas, ataupun chauvinisme. Tetapi tidak jarang perasaan (bias) kebanggaan muncul hanya karena cinta tanah air yang tulus, yang tertuang dalam persepsi "Indonesia sentrik" tersebut. Masalahnya adalah kurangnya kekangan metodologis dalam karya-karya yang terlalu menekankan bias ini.

Agaknya ketiga faktor itulah, yaitu penggunaan empathy secara gampang, suasana jaman, dan bias penulis maupun audiencenya, adalah sumber-sumber yang menimbulkan perbandingan di kalangan sementara penulis sejarah Indonesia. Imam Bonjol, umpamanya, dianggap pahlawan yang terlalu besar untuk diterima sebagai orang yang akhirnya menyerah pada musuhnya dan ditawan seumur hidup. Pattimura tidak mung-

kin muncul untuk memimpin suatu perlawanan yang meliputi Maluku Tengah, kalau ia berasal dari masyarakat Kristen yang nota bene selama berabad-abad (menurut visi itu) memihak pada Belanda. Pelbagai contoh lain bisa kita ajukan di sini. Bagaimana harus kita lihat Teuku Umar yang pernah menyerah pada Belanda? Dan bagaimana dengan pertanyaan seorang pembawa dalam ruang surat pembaca dari harian *Sinar Harapan* yang mempersoalkan kenyataan bahwa Pakubuwono VI yang mendapat gelar Pahlawan itu dalam kenyataannya pula pernah membantu Belanda melawan bangsanya sendiri? Lebih lagi, bagaimana dengan tokoh-tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia seperti Aru Palaka, Kapitan Yongker, dan lain-lain? Gambaran yang muncul mengenai Aru Palaka dari hasil penelitian terakhir justru sangat berlainan dari apa yang selalu muncul dalam sejarah Indonesia. Ternyata sebagai stabilisator keadaan intern Sulawesi Selatan sepeninggal kerajaan Goa-Tallo, peranan Aru Palaka tidak bisa diabaikan.

Masalah-masalah seperti ini memang banyak bermunculan dalam masyarakat kita. Pertanyaan sekarang adalah apakah hal-hal seperti itu perlu dilarang? Apakah ada yang mempunyai hak untuk melarangnya, sekalipun menganggap diri sendirinya sejarawan formal? Apakah memang sedemikian besar wewenang yang ada pada kita yang menganggap diri sebagai orang-orang yang mempunyai hak prioritas dalam apa yang pernah dikatakan sebagai *the management of clio's temple*? Apakah kita sebagai sejarawan formal harus berusaha mengekang sejarah dalam batasan lingkungan kita sendiri, seperti yang sudah terjadi dengan cliometri umpamanya, dan menghalau kaum awam dari bidang kegiatan ini? Memang, apabila kita mengambil sikap yang salah dalam soal "Penjernihan" ini, maka bisa-bisa hal-hal tersebut di atas itulah yang akan terjadi.

Sebagai sejarawan profesional saya kira kita malah menginginkan partisipasi masyarakat dalam banyak kegiatan yang kita jadikan perhatian pokok dan bidang profesi kita. Selain sejarah itu sendiri, altans salah satu aspeknya, sangat terbuka

bagi partisipasi umum, kita juga sering diingatkan oleh ungkapan-ungkapan seperti "veryone his own historian", bahwa bidang kesejarahan memang tidak bisa didukung dan dijadikan suatu bidang kegiatan yang dimonopoli oleh para sejarawan formal/akademik saja.

Dengan demikian, dalam menghadapi pelbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat berhubungan dengan kegiatan kesejarahan itu, kita tidak seharusnya mengambil sikap sebagai polisi lalu-lintas yang menahan dan, kalau perlu, menghukum pelanggar peraturan lalu-lintas. Tetapi di pihak lain, bukan sikap bertanggung jawab apabila kita membiarkan kegiatan kesejarahan ini mengarah ke suatu suasana kacau dan simpang siur. Sebab apabila itu terjadi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pentingnya sejarah. Lebih parah lagi, mungkin akan muncul sikap seperti Henry Ford, itu raja mobil Amerika di masa lalu, yang berpendapat bahwa sejarah adalah omong kosong belaka.

Tugas kita dalam hal ini memang tidak mudah. Disatu pihak kita harus berusaha agar gairah untuk menulis sejarah di kalangan masyarakat luas jangan sampai mati. Di pihak lain kitapun harus berusaha agar kekeliruan dan salah paham di antara pelbagai penulis sejarah tidak akan menghambat perkembangan kesadaran sejarah. Saya mengerti, bahwa membicarakan persoalan kesadaran sejarah memerlukan waktu tersendiri. Tetapi persoalan ini perlu saya singgung sepiantas lalu di sini, karena masalah kesadaran sejarah sangat erat berhubungan dengan penjernihan sejarah. Banyak orang yang berpendapat, bahwa kesadaran sejarah bisa muncul apabila orang banyak mengetahui fakta-fakta yang benar dan interpretasi sejarah yang tepat. Ini memang betul. Tetapi pemahaman materi saja tidaklah cukup. Barangkali, dalam banyak hal, justru lebih penting dari itu adalah pemahaman tentang hakekat studi sejarah (*historical studies*). Hakekat studi sejarah, saya kira adalah menyadari (lagi-lagi kata ini) bahwa sejarah adalah suatu dialog dalam tiga dimensi. Pertama-tama, studi sejarah

adalah suatu dialog antara sejarawan dan sumber sejarahnya. Kedua, studi sejarah adalah dialog antara satu sejarawan dengan sejarawan (para sejarawan) lainnya. Dan ketiga, studi sejarah adalah dialog antara sejarawan dan masyarakatnya. Dalam pengertian sejarawan di sini kita tentu bisa memasukkan, baik sejarawan akademik/profesional maupun sejarawan non-akademik, berdasarkan alasan di atas tentang "ramahnya" sejarah pada siapapun yang berusaha memahaminya.

Apabila hakekat studi sejarah tersebut di atas dapat kita "masyarakatkan" untuk meminjam suatu istilah yang kini demikian populer maka saya kira kita telah banyak berbuat untuk membantu meningkatkan kesadaran sejarah. Dengan demikian pula masyarakat memahami, bahwa sejarah pada dasarnya bukanlah suatu ilmu yang serba eksakta, atau suatu cerita yang sekali ditulis harus dipertahankan sepanjang masa. Tetapi haruslah dibangkitkan wawasan, bahwa pengetahuan sejarah lebih banyak berupa "pengetahuan eksperimental". Hanya dengan wawasan sedemikian kita bisa berharap bahwa ketegangan-ketegangan yang timbul mengenai seorang tokoh atau peristiwa tidak perlu menjadi sebab konflik yang abadi. Tetapi bersamaan dengan itu pula, kita tidak menimbulkan kesan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran sejarah dengan baik, salah satu pihak harus melepaskan pendapatnya dan terpaksa menerima pendapat lawannya yang diyakininya salah.

Untuk mencapai tujuan itu kiranya diperlukan suatu cara atau metode pula. Cara untuk mengkaji sampai di mana suatu karya sejarah mengandung kekeliruan-kekeliruan, dan dengan demikian dapat diajukan sasaran-sasaran untuk penjerihannya. Salah satu gagasan yang mungkin bermanfaat di sini adalah yang diajukan oleh sejarawan J.H. Hexter dalam *The International Encyclopaedia of Social Sciences* (kemudian dicetak lagi dalam kumpulan karangannya (*Doing History*, London 1971) dan yang pernah diterjemahkan oleh Proyek Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dari Drs. Abdurachman Suryomihardjo. Dalam artikel itu Hextor mengajukan suatu

cara yang ia namakan *historiographical analysis*. Kata historiografi di sini tidak dipakai dalam pengertian yang berlaku dalam awal makalah ini (sejarah dari sejarah), tetapi dalam pengertian hasil penulisan sejarah. Barangkali ada baiknya pula untuk menyinggung secara sepintas lalu sinyalemen Hexter, bahwa para sejarawan hanya menekankan pentingnya metodologi penelitian, tetapi sangat jarang mencari upaya untuk meneliti hasil-hasil penelitian tersebut. Memang dalam dialog antar para sejarawan yang dilakukan melalui majalah atau jurnal, umpamanya, saling mengecek hasil penelitian ini sering dilakukan. Tetapi yang diinginkan Hexter adalah, pertama-tama bukan perbantahan mengenai interpretasi yang sering lebih ditekankan dalam dialog semacam itu, tetapi pengecekan mengenai isi karya itu sendiri sebagai suatu bentuk penulisan. Cara ini sudah banyak dijumpai pada kalangan kritisi sastra. Tetapi berbeda dengan hasil sastra, hasil penulisan sejarah didasarkan pada sumber-sumber sejarah tertentu yang dikelola dengan cara tertentu pula. Metode kritik hasil tulisan semacam inilah yang dikemukakan Hexter tersebut. Metode analisis historiografi Hexter tersebut ada tiga macam:

- (1) Analisi makro ("macroanalysis"), yaitu usaha meneliti suatu hasil karya (buku, artikel) secara keseluruhan, dengan membandingkan sumber-sumber sejarah yang dipakai dalam buku itu dengan kesimpulan-kesimpulan dalam buku itu sendiri (interpretasi dan fakta). Dalam hal ini sejarawan yang melakukan penelitian atas karya yang bersangkutan harus bisa menemukan kembali semua sumber sejarah yang dipakai dalam tulisan tersebut dan mempelajarinya sekaligus untuk kemudian membandingkannya dengan kesimpulan-kesimpulan yang dipakai oleh penulis buku/artikel itu. Selain itu sang peneliti juga harus bisa mengemukakan sumber-sumber yang tidak dipakai, dan memperlihatkan konsekwensinya dalam karya tersebut. Dalam pekerjaan ini jelas masalah retorika umum, atau bahasa yang digunakan, perlu mendapat perhatian pula.

Pentingnya penggunaan bahasa ini adalah karena berbeda dengan ilmu-ilmu lain (fisika, matematika), sejarah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya, terutama dalam karya-karya yang bergaya naratif.

- (2) Analisis mikro ("microanalysis"), yaitu cara yang sama dalam analisa makro, tetapi terbatas pada satu-dua alinea atau pada satu sub-bab maupun pada satu bab saja. Sebab itu di sini masalah-masalah seperti organisasi buku/artikel, yang merupakan aspek dari keseluruhan (makro) buku/artikel, tidak dipersoalkan. Dalam analisa mikro hal-hal yang menarik perhatian adalah segi-segi yang lebih subtil, seperti karekterisasi ("orang itu baik", atau "buruk"), dan lainnya.
- (3) Analisis struktur ("analysis of structure"), yaitu memeriksa peralatan-peralatan yang esensial dalam penulisan sejarah seperti catatan (kaki atau belakang), kutipan, dan daftar-daftar. Terutama catatan sangat penting dalam penulisan sejarah, karena pertama-tama merupakan suatu alat pembuktian, dan bukan sekedar tambahan dari suatu penulisan.

Metode penelitian hasil tulisan sejarah yang diajukan Hexter ini memang bisa digunakan untuk semua macam hasil penulisan sejarah. Tetapi terutama dapat dipakai untuk karya-karya sejarah yang dimaksud dalam awal makalah ini (yang bergaya naratif). Masalahnya tentunya, adalah menemukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam persyaratan ini memang tidak diharuskan adanya pengetahuan ekspert mengenai masalah yang sedang diteliti. Tetapi paling kurang, selain menguasai metodologi penelitian sejarah, sang peneliti harus mengenal permasalahan materi sejarah yang bersangkutan.

Hasil penelitian historiografi seperti dimaksud di atas, dapat disampaikan melalui cara-cara yang konvensional, yaitu dalam suatu artikel untuk diedarkan secara luas agar diketahui oleh umum. Tetapi ada baiknya pula barangkali, apabila hasil-

hasil penelitian semacam ini didiskusikan secara terbuka (melalui RRI atau TV-RI, umpamanya) dengan para penulis buku yang bersangkutan. Sudah tentu dalam hal terakhir ini, moderatornya harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan yang tidak baik.

Barangkali, pada saat ini juga sudah diperlukan suatu majalah sejarah yang dikelola secara baik dengan staf redaksi yang kompeten. Dengan cara-cara itu, maka hasil-hasil penelitian historiografis dapat meluas, sehingga wawasan mengenai hakekat sejarah seperti disinggung di atas, dapat meluas pula, dan pada akhirnya akan menunjang peningkatan kesadaran sejarah di Indonesia.

UPAYA PENJERNIHAN SEJARAH DAERAH SULAWESI SELATAN

Dr. Mukhlis P.

Pendahuluan

Sejarah adalah Suatu Kajian yang berhubungan dengan record. Ia memberi pengetahuan tentang masa lampau, termasuk peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan demikian jelaslah bahwa sejarah sebagian besar merupakan hasil penelitian idiografis. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua sejarah dapat dinilai sebagai tulisan idiograf yang hanya menguraikan masa lampau semata-mata.

Fustel de Caulanges dan Gustave Glatz telah membuktikannya dengan melahirkan corak baru dalam penulisan sejarah yang bercakrawala luas yakni dengan menggabungkan antara sifat idiografis dan yang monotetik dalam penulisan sejarah. Dengan demikian jelaslah bahwa kesempurnaan suatu uraian sejarah tidak semata-mata tergantung pada kesempurnaan atau kemantapan recordnya, tetapi juga sangat ditentukan oleh luasnya cakrawala imajinasi dan ketajaman analisisnya.

Bertolak dari kedua hal ini maka yang sangat penting bagi upaya penjernihan sejarah khususnya sejarah daerah Sulawesi

Selatan menyangkut tiga hal utama; *Pertama*: menginvenarisasi naskah-naskah sejenis. Sejenis dalam arti isi dan informasinya sama. Sebagai contoh bahwa ternyata naskah *Lontara Bone (Attariolong Bone)*. Sekurang-kurangnya terdiri atas 7 sampai dengan 9 versi. *Kedua*: melakukan kritik atas recordnya, informasinya, baik yang lama maupun yang baru; *Ketiga*: memberinya babat ilmiah lewat analisa Sejarah dan kemampuan membenahi "Pseudo Sejarah" yang melekat padanya dan menjelaskan secara ilmiah pula sebab-akibat yang mengitari peristiwa.

Bertolak dari ketiga hal ini upaya penjernihan sejarah daerah Sulawesi Selatan seyogyanya dilakukan dari kasus sejarah yang paling awal, yakni dengan menjernihkan konsep *Tumanurung* melalui analisa ilmiah; dengan demikian ini berarti membuatnya sebagai suatu peristiwa sejarah yang dapat dimengerti. Ini berarti bahwa sejarawan daerah di Sulawesi Selatan di tuntut untuk membebaskan tokoh *Tumanurung* dari kekangan mitologi dan memberinya ruang lingkup untuk hidup dalam masa sejarah, masa yang dapat dijangkau oleh satu studi kritis.

1. "Pada suatu hari setelah terjadi hujan yang disertai petir selama tujuh hari tujuh malam, tiba-tiba ditemukan seorang putri yang cantik jelita duduk di bawah pohon tanpa *jambe-jambe* di kampung Takabassia. Tak ada seorang pun yang mengetahui dari mana asalnya, dan orangpun bersepakat menyebutnya *Tumanurung* (orang yang turun dari langit). Paccallaya (ketua kaum) bersama orang banyak kemudian memintanya agar sudi tinggal di bumi (Gowa) dan bersedia di angkat menjadi raja di Gowa" (ringkasan *Lantara Gowa*).
2. "Pada suatu hari setelah terjadi hujan yang disertai petir selama tujuh hari tujuh malam, tiba-tiba ditemukan seorang yang berpakaian serba putih di tengah padang rumput yang luas. Tak ada seorang pun yang mengetahui dari mana asalnya, dan orangpun bersepakat menyebutnya

Tumanurung (orang yang turun dari langit). Ketika kepadanya diminta untuk tinggal menetap di bumi dan agar bersedia menjadi raja, orang yang disebut *Tumanurung* itu menolak. Ia sebaliknya mengusulkan agar orang atau rakyat Bone mengangkat seseorang yang berpakaian *serba kuning* karena dialah yang berhak menjadi raja. Ia pun membawa orang-orang menjumpai orang yang dimaksud itu. Tak jauh dari padang rumput itu duduk seorang yang berpakaian *serba kuning* di atas sebuah batu besar. Orang-orang pun bersepakat pula menyebutnya *Tumanurung* dan mengangkatnya menjadi Raja di Bone". (ringkasan *Lantara Bone*).

Siapakah sebenarnya wanita cantik yang berpakaian *serba putih* yang menjadi tokoh *Tumanurung* di Gowa, dan siapakah sebenarnya tokoh *Tumanurung* di Bone itu, tak pernah dijelaskan secara terbuka baik oleh penulis-penulis lontara terdahulu, maupun oleh penulis-penulis sejarah daerah hingga sekarang. *Tumanurung* seakan berada dalam lingkaran mitos yang *kasi-palli*, *pemali* atau *tabu* untuk dibicarakan.

Di sinilah rupanya kepincangan itu terjadi, karena titik tolak dari satu analisa sejarah haruslah bersih dari *pemali* dan *tabu*. Ia harus realistik, tidak hanya dalam makna yang ideal, tetapi juga realistik dalam wujud. Dalam situasi demikian, barulah ia dapat dijadikan bahagian dari wawasan historis.

Membenahi asal *Tumanurung* bagi upaya penjernihan sejarah Sulawesi Selatan, diakui bukan pekerjaan yang mudah, karena di sini sejarawan diperhadapkan bukan hanya pada suatu studi yang menyangkut kritik sumber, tetapi juga diperlukan keberanian untuk memasuki belantara Folklore dan menjelaskannya secara terbuka bahwa *Tumanurung* adalah juga sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah konsep tentang kekuasaan orang Bugis-Makassar yang hanya dapat dimengerti melalui renungan yang bersifat multi dimensional.

Mitos dan Realitas dalam Sistim Politik masyarakat Bugis-Makassar.

Beberapa penelitian telah berusaha mengungkapkan bahwa kehidupan sosial dan politik masyarakat Sulawesi Selatan nampak menunjukkan bahwa aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat diwarnai oleh gambaran idaman masyarakat tentang ketertiban.¹ Kalau demikian itulah sebabnya, mengapa H.A. Sutherland menyatakan bahwa gambaran idaman masyarakat merupakan kerangka organisasi dan penilaian tingkah laku mereka oleh karena itu kelembagaan politik di Sulawesi Selatan hanya dapat dipahami bila dilihat saling hubungan antara gambaran idaman, sistim politik, dan hubungan kekuasaan yang nampak.²

Pembentukan pemerintahan awal di Sulawesi Selatan, menurut epos *I La Galigo*, berpangkal pada hasil keputusan dari sepasang dewa terpenting yang memerintah dunia atas (*botting langi*) yaitu *Datuk Patoto'e* dan *Datuk Palinge* dengan sepasang dewa yang memerintah dunia bawah (*paratiwi*) yaitu *Curu ri Selleng* dan *Sinau Toja*.³ Keputusan itu yang akhirnya menciptakan *dunia antara*, yaitu bumi tempat pemukiman manusia. Penguasa dunia atas menurunkan putranya yaitu Batara Guru (*Tumanurung* pertama) bersama dayang-dayangnya dan penguasa dunia bawah menaikkan seorang putrinya yaitu We Nyili Tino (*Tu'tompo* pertama) yang kemudian menjadi permaisuri Batara Guru.

1) Mattulada, "Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis", disertasi, Universitas Indonesia (Jakarta: 1975); Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palaka* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981); H.A. Sutherland, "Political Structure and Colonial Control in South Sulawesi", *Man, Meaning and History*, R. Scheldfold, J.W. Schoorl, dan J. Tennekes, peny. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hal. 230-246.

2) H.A. Sutherland, *op.cit.*, hal. 234.

3) Mattulada, *op.cit.*, hal. 357-360; Leonard Y. Andaya, *op.cit.*, hal. 10-14; Gilbert Hamonic, "Pengantar Studi Perbandingan Kosmogoni Sulawesi Selatan", *Citra Masyarakat Indonesia*, Maecel Bonneff, dkk, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal 14.

Pemerintahan keturunan dari penguasa dunia atas dan dunia bawah yang berpangkal dari perkawinan antara Batara Guru dan We Nyili Tino dilukiskan sebagai Pemerintah para dewa-dewa. Pemerintahan ini tidak berlangsung terus karena keturunan para dewa itu kembali ke dunia dewa-dewa. Periode sesudah keturunan para dewa itu kembali ke dunia mereka digambarkan sebagai masa khaos, masa yang penuh dengan kekacauan. Hidup manusia bagaikan kehidupan ikan; ikan yang besar dan kuat menjadikan ikan yang kecil dan lemah sebagai makanannya. Tidak ada tata tertib dalam kehidupan manusia di *dunia antara* ini, karena umat manusia sudah ketiadaan pemimpin yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadaan ini, berdasarkan tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Bugis dan Makasar, akhirnya dapat teratasi karena manusia di bumi ini telah mendapat petunjuk dari sang dewata untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat. Petunjuk itu diberikan lewat benda suci yang diturunkan sebagai simbol kehadiran mereka. Riwayat penemuan benda itu diceriterakan sebagai suatu kejadian yang ajaib. Benda itu yang mereka sebut *gaukang* (Makasar) atau *gaukeng* (Bugis), *Gaukangg* atau *gaukeng* yang mereka percaya sebagai benda titisan dewa itu oleh masyarakat dipuja dan disembah dan dipandang memiliki kekuatan luar biasa yang menguasai dunia ini, sehingga *gaukang* itu merupakan pelindung kehidupan masyarakat.

Penemuan *gaukang* ini dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dapat dipandang sebagai riwayat pemukiman dan pemerintahan manusia. Umumnya tempat di mana diketemukan *gaukeng* itu dipandang sebagai pusat pemukiman pertama dan penemu benda itu menjadi pemimpin masyarakat yang terpaut pada benda itu. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kesatuan masyarakat dan penataan organisasi kemasyarakatan berkaitan erat dan berpaut pada gagasan idaman yang mereka kenakan pada *gaukang* mereka.

Gaukang atau *gaukeng* itu suatu benda yang dinyatakan berbentuk aneh, berupa sepotong kayu, gambar, sepotong besi, boneka, patung, umbian kering, dan yang paling umum adalah sebuah batu. Benda itu yang mereka puja dan sembah sebagai pelindung jiwa kehidupan masyarakat mereka, karena ia merupakan benda titisan dewa, suci, dan memiliki kekuatan yang menguasai alam jagat ini. Sebagai tanda hormat dan ketaatan mereka, mereka memberikan tanda-tanda kebesaran bagi *gaukang* itu berupa senjata, perhiasan, peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Benda yang ditambahkan itu mereka sebut *kalompoang*. Dalam perkembangan kemudian keseluruhan benda itu, baik *gaukang* maupun *kalompoang* dinyatakan saja dengan *kelompoang* dalam pengertian yang dipertuankan⁴); karena benda-benda itu yang dipandang sebagai pemilik utama kekuasaan dan tanah.⁵)

Kalompoang (Makassar) atau *Arajang* (Bugis) yang kini dipandang hanya sebagai regalia kerajaan sesungguhnya menunjukkan pada kekuasaan di masa lampau – yang dipakai oleh pada pendiri kerajaan – dan kekuatan yang diterima dari dewa-dewa yang memberikan kewenangan kepada seorang manusia untuk memerintah sesamanya. Asal mula *kalompoang* atau *arajang* yang berpusat pada *gaukang* atau *gaukeng* yang bersifat ilahi dan historis telah menjelmakan suatu kekuasaan sakral, yang memberikan pada pihak yang memegangnya supremasi dan kemampuan untuk memerintah. Benda-benda itu yang kemudian merupakan persyaratan untuk semua kekuatan dan kewenangan, dengan kata lain pemilikan benda itu berhubungan dengan penguasaan yang sah dan lambang kedudukan bagi yang melaksanakan kekuasaan. Ia merupakan suatu jaminan legiti-

4) Edward L. Poelinggomang, "Perubahan Politik dan Hubungan kekuasaan: Makassar 1905-1942", tesis s.2, Universitas Indonesia (Jakarta: 1984), 57-59.

5) C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, jld. I (Leiden: E.J. Brill, 1931), hal. 378; Barbara S. Harvey, "Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965", disertasi, Cornell University (Ithaca; 1974), hal. 19; Edward L. Poelinggomang, *op. cit.*, hal. 62.

masi, karena memberikan kesaksian bahwa pemegang telah memiliki kekuasaan yang berasal dari kekuatan yang menguasai alam semesta ini (dewa-dewa) dan bahwa kekuasaan itu akan bekerja dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang terpaut pada benda itu.

Pemegang *gaukang* sebagai penguasa dengan wewenang kekuatan Ilahi (kultus dewa raja) telah menempatkan dirinya sebagai pusat pengendalian kekuatan masyarakat, sekali gus menjadi imam yang mengkultuskan kekuatan Ilahi. Hal ini terpaut pada kendali ornament yang mengarahkan dan menyalurkan kekuatan kekuasaan. Dapat dikatakan benda itu memiliki superioritas mutlak: yaitu pada dewa-dewa atau kekuatan yang menguasai alam semesta ini, kepada penguasa atau raja, dan pada tata tertib politik yang menguasai struktur hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu pada waktu pelantikan pejabat pengganti penguasa atau raja senantiasa dibacakan ikrar kepatuhan/ketaatan terhadap tata tertib yang diwarisi dari pendiri kerajaan dan tata tertib yang berasal dari orang yang menjadi pengganti yang terdahulu sesuai dengan tradisi yang berlaku.⁶⁾

Penemuan *gaukang* atau *gaukeng* yang berakibat terbentuknya satu kesatuan masyarakat *gaukang* yang akhirnya mewujudkan satu unit politik yang kami sebut dengan *kekaraongan*.⁷⁾ Penemu *gaukang* tak kemudian keturunannya, yang boleh mewarisi sebagai pemegangnya mendapat superioritas (suatu status kebangsawanan) dan kemampuan untuk memerintah, walaupun demikian pada setiap periode pemerintahan hanya ada seorang yang dipilih sebagai penguasa yang memiliki kedu-

6) A. Zainal Abidin, "*Beberapa Ungkapan Dalam Lontara Tentang kepemimpinan dan pemerintahan*", (Ujung Panjang: Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII, 1973), hal. 2-25.

7) Penamaan unit politik ini untuk tidak mengaburkan berbagai nama yang sering dikenakan. Ada yang menyebutnya dengan "masyarakat *gaukang*" (Leonard Y. Andaya), ada yang menamakan *bori* atau kesatuan anang/kaum (Mattulada), dan karangan-karangan orang Belanda menyebutnya dengan *rijksje*, *karaengschap*, *glarangschap*. Semua penamaan itu menunjukkan adanya seorang figur yang memegang kekuasaan dan kewenangan memerintah atas wilayah *kekaraongan*.

dukan teratas sebagai puncak piramida pemerintahan. Hal ini tergambar dalam penataan pemerintahan pada unit politik terkecil itu. Penguasa sebagai puncak pimpinan dibantu oleh sebuah dewan hadat yang dikenal dengan nama *Baku Lompoa*. Anggota dewan ini adalah kerabat *karaeng* (raja atau penguasa) yang berperanan sebagai penasehat karaeng sekali gus sebagai pembantu karaeng dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu dewan ini pula yang merupakan lembaga yang berwewenang melaksanakan pemilihan pengganti *karaeng*. Apabila *karaeng* yang terdahulu meninggal atau dipecat.

Secara hirarkhis, *karaeng* masih membawahi beberapa pimpinan kesatuan masyarakat yang lebih kecil yang disebut *matoa* (Makassar) atau *macoa* (Bugis).⁸⁾ *Matoa* berperanan dalam mengurus segala hal ikhwal kelompok kerabatnya, menyelesaikan perselisihan, mengatur penyerahan hasil dan angkatan tenaga kerja bagi *karaeng*. Dalam urusan menyangkut penyerahan hasil dan angkatan tenaga kerja, *matoa* dibantu oleh *sariang* atau *peranung* yang berperanan sebagai pengawas dalam kegiatan itu.⁹⁾ *Matoa* itu merupakan pimpinan dan kesatuan kerabat yang lebih kecil yang menempati perkampungan dari wilayah kakaraengan yang dikenal dengan *lembang* atau *kampong-* pada dasarnya penghuni kampung itu merupakan kesatuan genealogis terkecil dari kesatuan masyarakat gaukang, dan bukan kesatuan administrasi pemerintahan terkecil. Baru setelah pemerintahan Hindia Belanda menata pemerintahan secara baik di Sulawesi Selatan, *lembang* atau *kampong* itu dijadikan kesatuan terkecil dari penataan administrasi pemerintahan.

⁸⁾ *Matoa* berarti yang dituakan atau dipandang tua. Dalam hubungan dengan jabatan ini *matoa* tidak bergantung pada usia tetapi berpatokan pada kemampuan dan kesanggupan pemahaman seseorang pada adat kebiasaan dan dipandang oleh kelompok kerabatnya dapat memimpin mereka.

⁹⁾ Dalam beberapa laporan pemerintah Hindia Belanda dinyatakan bahwa bentuk ini tetap dipertahankan dan dijadikan kesatuan pemerintahan terkecil. M. A. Los, "Memorie van Overgave Onderafdeeling pangkajeng" (Mei 1931-Juli 1934), bahan arsip (Leiden: KITLV) Hal. 7; W.J. de Klein, "Bestuurme - morie van Onderafdeeling Makassar" (1945-1947), bahan arsip (Leiden: KITLV), hal. 2.

Bentuk unit politik yang merupakan kekaraengan ini, dalam perjalanan sejarahnya tidak dapat mempertahankan kemandiriannya. Hal itu disebabkan oleh perselisihan-perselisihan dan peperangan-peperangan yang senantiasa mengancam ataupun terjadi antara satu kekaraengan dengan kekaraengan lainnya. Keadaan ini telah mendorong beberapa *karaeng* berusaha menjalin hubungan kerjasama dan bantu-membantu agar dapat menyelesaikan pertentangan di antara mereka dan untuk mempersatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari kekaraengan lainnya. Jalinan kerjasama dan bantu membantu itu akhirnya menghasilkan terbentuknya suatu dewan yang beranggotakan masing-masing *karaeng* dari kekaraengan-kekaraengan itu, dan memilih salah seorang di antara anggota-anggota dewan itu menjadi ketua dewan itu. Menyangkut kehidupan persekutuan, dewan ini berfungsi sebagai lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara kekaraengan-kekaraengan yang menjadi anggota persekutuan itu, dan dalam rapat dewan itu, ketua dewan merupakan anggota terpenting dalam penyelesaian sengketa antar kekaraengan. Oleh sebab itulah jabatan ketua dewan *hadat* itu umum dikenal dengan *Pacallaya* (orang yang mencemoohkan). Di pihak lain, dalam menghadapi ancaman dari luar, ketua dewan itu tampil sebagai figur utama dalam menyatukan kekuatan dari anggota persekutuan. Hal ini yang menyebabkan sebagian penulis cenderung menyatakan ketua dewan itu dengan "raja kepala" (*hoofdvorst*)

Lembaga Persekutuan atau *Dewan Hadat* itu sesungguhnya bukan merupakan suatu lembaga tetap. Pertemuan anggota dewan baru terselenggarakan bila ada permasalahan yang dipandang harus dipikirkan dan diselesaikan bersama. Kehadiran mereka juga bergantung dari undangan ketua dewan dan umumnya pertemuan dilakukan di kediaman ketua dewan. Pada umumnya kedudukan atau jabatan ketua Lembaga Persekutuan selalu dipertahankan oleh *karaeng* yang pertama dipilih untuk tetap diwarisi bagi keturunannya. Walaupun demikian ketua Lembaga Persekutuan tidak memiliki wewenang untuk men-

campuri urusan pemerintahan dari kekaraengan yang menjadi anggota persekutuan itu. Masing-masing *karaeng* dari setiap kekaraengan melaksanakan kekuasaan dan pemerintahan di wilayah kekaraengan mereka masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan tradisi setempat tanpa campur tangan ketua lembaga persekutuan, *pacallaya* atau raja kepala.¹⁰⁾

Kedudukan ketua Lembaga Persekutuan sebagai figur utama dalam mempersatukan kekuatan anggota persekutuan dalam menghadapi ancaman dari luar lambat laun berkembang menjadi pemimpin dari persekutuan itu menyangkut kegiatan keluar seperti menjalin kerjasama dengan kerajaan lain dan lain-lainnya. Dalam hal inilah sering persekutuan itu dipandang sebagai bentuk pemerintahan serikat (konfederasi), dan menampilkan ketua lembaga persekutuan sebagai raja kepala dan *karaeng-karaeng* dari kekaraengan sebagai pengikut (*minawang*) raja kepala dengan kekuasaan otonom penuh di wilayah kekaraengan masing-masing, dengan pengertian bukan sebagai wakil raja kepala di wilayah kekaraengan masing-masing.

Di antara bentuk "pemerintah serikat" yang berkembang di Sulawesi Selatan ini, terdapat beberapa "pemerintah serikat" yang dalam perkembangan kemudian berkembang menjadi bentuk "kerajaan" yang besar dengan menampilkan konsep *tu' manurung*. Konfederasi Gowa, misalnya, yang pada mulanya merupakan persekutuan dari sembilan kekaraengan, kemudian berubah menjadi kerajaan Gowa, setelah diketemukannya seorang putri cantik yang dipandang turun dari kayangan dan dinobatkan sebagai ratu kerajaan Gowa yang pertama dengan nama *Tu' manurung*. Ratu *Tu' manurung* ini yang kemudian menurunkan keturunan raja-raja yang memerintah Kerajaan Gowa. Sembilan *karaeng* yang pada awal merupakan anggota

10) Menyangkut bentuk pemerintahan ini dengan segala kegiatannya digambarkan secara terperinci oleh seorang bekas kontrolir di Sulawesi Selatan yaitu P.J. Kooremen, dalam karangannya yang berjudul "De Feitelijke Toestand in het Gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden", *IG* (1883), bgn I, hal. 171-204; 358-384; 482-498; 637-655.

dari Lembaga Persekutuan itu kemudian menjadi satu dewan kerajaan yang dikenal dengan nama *Kasuwiyang Salapang* (Sembilan Pengabdi). Dewan *Kasawiyang Salapang* ini kemudian dirubah namanya menjadi *Bate Salapang* (Sembilan Panji).^{1 1)}

Hal sama pula terjadi pada bentuk kerajaan orang Bugis. Sebagai contoh Kerajaan Bone, misalnya. Sebelum kehadiran Tu'manurung, terdapat tujuh kelompok *anang* atau kekaraengan yang membentuk satu persekutuan yang dikenal dengan nama *Kawerrang Tana Bone* (Ikatan Tanah Bone). Setelah kehadiran Tu'manurung dan dinobatkan menjadi raja, Lembaga Persekutuan itu, berubah menjadi dewan hadat yang dikenal dengan *Matua Pitue*. Dewan *Matua Pitue* ini kemudian berubah namanya menjadi *Ade 'pitue*.^{1 2)}

Pelantikan Tu'manurung (Makassar) atau To'manurung (Bugis) diikat oleh sebuah ikrar bersama antara Tu-Manurung dan anggota dewan persekutuan. Ikrar itu kemudian secara turun temurun digunakan dan diucapkan pada waktu pelantikan raja baru yang hendak dinobatkan.^{1 3)} Pada dasarnya ikrar itu memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam ikrar pelantikan yang merupakan "perjanjian kenegaraan" (*governmental contract*) Kerajaan Gowa yang menyatakan sebagai berikut:

- "bahwasanya kami telah menjadikan engkau raja kami dan kami menjadi abdimu.
- bahwa engkau menjadi sampiran tempat kami bergantung dan kami menjadi labu (tempat air) yang bergantung kepadamu.
- bahwa apabila sampiran itu patah, lalu tak pecah berantakan labu (tempat air) itu, maka hianatlah kami.

11) Mattulada, *op. cit.*, hal. 370-371.

12) *Ibid*, hal. 376-377.

13) Menyangkut ikrar yang diucapkan pada waktu pelantikan raja-raja dari beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, lihat: *Ibid*, hal. 382-389.

- bahwa kami tak tertikam oleh senjatamu, sebaliknya engkau pun tak terbunuh oleh senjata kami.
- bahwa hanya dewatalah yang membunuh kami dan dewata jugalah yang membunuhmu.
- bertitahlah engkau dan kami menaatinya, akan tetapi apabila kami telah menjinjing, tidaklah kami akan memikul lagi dan apabila kami telah memikul tidaklah kami akan menjinjing.
- anginlah engkau dan kami daun kayu, akan tetapi hanyalah daun kayu kering yang engkau luruhkan.
- airilah engkau dan kami batang kayu hanyut, akan tetapi hanya banjir saja yang dapat menghanyutkannya.
- terhadap anak dan istri kami yang tak disukai oleh negara maka kami pun tak menyukainya.
- bahwa engkau kami jadikan raja atas diri kami tetapi harta benda kami bukanlah engkau merajainya.
- bahwa engkau pantang mengambil ayam kami dari tenggeramanya, pantang engkau mencopet telur kami dari keranjang kami.
- bahwa apabila engkau menghendaki barang sesuatu dari kami, engkau membelinya yang patut engkau membeli, engkau pertukarkan yang sepatutnya engkau minta, maka kami memberimu, pantang engkau meniadakan milik kami.
- bahwa raja tak menetapkan sesuatu keputusan tentang masalah dalam negeri tanpa *Gallarang*, dan *Gallarang* tak menetapkan sesuatu tentang peperangan tanpa raja.”

Ikrar pelantikan antara *Tu'manurung* dan karaeng-karaeng anggota Lembaga Persekutuan dari Kerajaan Gowa ini menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran manusia dewa untuk memerintah manusia di bumi ini bukanlah pemilik kekuasaan mutlak sepenuhnya. Itulah sebabnya dalam ikrar itu terdapat penentuan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa mitos *tu'manurung* hanyalah merupakan konsep pengabsahan kedudukan raja bagi terbentuknya kerajaan, sekali gus memberikan supermasi (status kebangsawanan khusus) bagi raja dan keturunannya sebagai lapisan teratas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal yang nampak memegang peranan penting bagi kehi-

dupan perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan adalah atribut kerajaan yang disebut *kalompoang* (Makassar) atau *arajang* (Bugis). Jika pada unit politik yang disebut keka-raengan terpaut pada benda yang diketemukan secara ajaib dengan bentuknya yang ajaib pula mereka sebut dengan *gaukang* atau *gaukeng* maka pada kerajaan-kerajaan yang mengenal konsep *tu 'manurung* ini benda yang mereka sebut *kalompoang* atau *arajang* itu adalah benda peninggalan tokoh yang dinyatakan turun dari kayangan yang mereka nobatkan sebagai peletak dasar kerajaan. Benda itu merupakan jaminan pengabsahan yang memberikan kesaksian bahwa pemegang telah memiliki kekuasaan sebagai perwalian pemilik utama kekuasaan yang berasal dari *kalompoang* dan dengan demikian pemegang kekuasaan itu akan bekerja sesuai petunjuk pemilik utama kekuasaan itu bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Itulah sebabnya ketaatan rakyat kepada seorang raja bergantung pada *kalompoang* yang dipegangnya.¹⁴⁾

Kalompoang atau *arajang* sebagai jaminan pengabsahan kedudukan kekuasaan dalam kehidupan pemerintah di dalam masyarakat Bugis dan Makassar nampak bertahan terus hingga pertengahan pertama abad ke-20. Pada tahun 1931, ketika pemerintah Hindia Belanda ingin memulihkan kedudukan bekas kerajaan Bone dengan maksud untuk menjalin hubungan kerjasama dengan bangsawan kerajaan itu, pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus bersedia mengembalikan *arajang* kerajaan Bone yang telah disita dan dirampas pada waktu penyerangan terhadap kerajaan itu pada tahun 1905. Demikian pula halnya dengan kerajaan Gowa yang dipulihkan kedudukannya pada tahun 1938. Hal itu tentunya erat berkaitan dengan anggapan

14) Menyangkut peranan *kalompoang* atau *gaukang* sebagai jaminan pengabsahan kekuasaan dapat dibaca dalam: P.J. Kooreman, *op. cit.*, hal. 186-188; J. Tide-man, "De Batara Gowa op Zuid Celebes", *BKI* (1908), hal. 350-390; H.J. Friedericy, "De Staden bij de Boeginezen en Makassaren" *BKI* (1933), hal. 491-493. Kooreman mengutarakan pengalamannya sedangkan Tideman dan Friedericy mengungkapkan hasil penelitian mereka menyangkut anggapan dan peranan *kalompoang* atau *gaukang* dalam kehidupan pemerintahan.

bahwa *kalompoang* atau *arajang* yang dapat merupakan jaminan kesucian dan ketaatan. Melalui benda itu pemegang menerima kekuasaan dan akan terikat pada ikrar kepatuhan, ketaatan, dan tata tertib yang diwarisi oleh para pendiri kerajaan, sehingga dapat memikat pengakuan dan ketaatan dari rakyat.

Gambaran ini menunjukkan bahwa proses eksternalisasi yang menciptakan gagasan *gaukang* atau *kalompoang* telah merupakan nilai-nilai yang tetap dipertahankan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Bugis – Makassar. Gagasan ini merupakan jaminan kesucian dan ketaatan yang menuntut setiap anggota kesatuan masyarakat untuk bersikap dan bertindak jujur terhadap diri sendiri agar kekuatan yang menguasai alam semesta dapat menjamin terwujudnya tujuan masyarakat yaitu kesejahteraan dan ketertiban.

PENJERNIHAN SEJARAH

Drs. Soleh A. Djamhari

Apa yang dimaksud dengan Penjernihan, siapa yang perlu dijernihkan; mengapa dijernihkan, lalu kemudian sasaran-sasarannya.

Sebagai seorang yang berkecimpung di dalam sejarah kontemporer, saya selalu mendapat pesan. Pesan dari seorang tokoh atau pelaku, misalnya tolong masukkan saya. Ini sejarah kontemporer.

Di samping pesan, juga kritik dari yang lunak sampai dengan caci makian. Semuanya ini konsekwensi dari seorang yang bertugas dalam sejarah kontemporer. Mungkin bagi yang lain belum dianggap sejarah.

Mengapa sejarah ini yang perlu dijernihkan. Jadi karena kondisi yang demikian itu, maka saya berkesimpulan bahwa memang banyak hal atau banyak kelangkaan dari pada informasi yang belum diterima oleh sejarawan. Oleh karena itu caci-an, makian yang diterima dari kritik, bahkan kritik yang paling keras adalah naskahmu. Kalau mengambil kata-kata Gostchalk, kamu tidak bisa memasukkan api ke dalam naskah, tapi kamu bisa masukkan naskahmu ke dalam api. Ini merupakan kritik

yang paling tajam, tapi kita terima dengan senang hati sebagai suatu konsekwensi. Masalahnya mengapa terjadi demikian adalah karena beberapa sebab, yakni:

Kekurangan informasi kepada sejarawan, sehingga ada seseorang yang merasa dirugikan atau tidak dimasukkan. Paling netral adalah tidak disebut. Akhirnya timbul pernyataan seperti yang disinyalir oleh Drs. Abdurachman Surjomihardjo bahwa sejarawan jangan dikorup. Sesungguhnya itu bukan kesalahan kami, tapi kesalahan karena informasi tidak sampai kepada kami. Memang di dalam praktek kehidupan kita bahwa kejadian distorsi ini adalah sangat lumrah, karena sumber atau nara sumber enggan menyampaikan. Ini untuk sejarah kontemporer dan kalau ada tidak tertulis tidak dimasukkan mendapat akibat seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu permasalahan dari pada penjernihan ini adalah akibat tidak adanya atau kurangnya informasi. Lalu bagaimana kita memperbaiki. Sudah barang tentu ini menyangkut bidang teknis, juga bidang keahlian. Ini jadi masalah, walaupun Fakultas Sastra selalu memproduksi sejarawan. Sedangkan yang senior sekarang sudah tidak bisa diharapkan mencari informasi secara detail dan baik, ini biasanya karena terlalu sibuk. Ini adalah satu masalah bagi kita sebagai upaya untuk penjernihan ini.

Kemudian sasarannya untuk apa penjernihan ini, disampaikan kepada siapa, ini merupakan informasi baru, jadi mendapat masukan, harus juga menghasilkan keluaran. Keluaran ini apakah bisa langsung kepada pemakai atau berada di lemari yang tidak disinggung-singgung. Ini juga menjadi masalah sebab hasil-hasil penelitian itu kadang-kadang tidak sampai kepada pemakai. Hal ini saya tekankan karena menyangkut bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa yang sudah diusahakan kemudian akan steril di lemari tanpa sampai kepada pemakai. Ini adalah sasaran penjernihan yang sudah diupayakan dan yang kita inginkan. Kemudian di dalam pelaksanaan penjernihan ini yang menjadi masalah bagi kami adalah bagaimana memperlakukan secara adil. Memang agak susah karena ini se-

bagai sarana pendidikan. Maka apa yang dikatakan oleh Ki Suratman adalah untuk mendidik budi pekerti dan untuk kebanggaan dan sebagai pendidikan. Maka bentuk dari pada fairness ini kita harus hati-hati dalam mengungkapkannya. Bagaimana seorang tokoh kita perlakukan sebagai seorang pahlawan, tapi ternyata banyak cacatnya. Apakah ini perlu dibuang atau dimaki lebih dalam atau diperlakukan yang bagaimana. Sudah barang tentu kita mempunyai cara yang tersendiri, sebagaimana kita di sini banyak melihat dari berbagai macam suku-suku yang Berbhineka Tunggal Ika ini untuk suatu fairness. Memperlakukan secara fair suatu tokoh ini kalau mengungkapkannya tidak hati-hati memang akan menimbulkan masalah atau implikasi yang lebih lanjut. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa ini di dalam praktek (karena maki-makian saya terima) memang menyampaikan suatu ungkapan, memperlakukan suatu tokoh ini harus mempunyai kultur untuk menyampaikan. Kalau sudah menang tidak *dosorake*, yang kalah yang senang, yang menang ya menang, karena menang itu bisa dicapai tanpa kekerasan. Memperlakukan tokoh yang tokoh itu sebagai manusia biasa juga mempunyai cacat. Kemudian menang di dalam konteks ini ada beberapa masalah mengenai kesadaran sejarah. Misalnya, pada pagi-pagi (ini masalah kedua), kesadaran sejarah dalam masyarakat memang relatif tinggi, karena pagi-pagi saya pada waktu itu ditanya oleh seseorang, apa benar pengibaran bendera atau upacara 17 Agustus 1945 itu dilakukan jam 10.00 pagi seperti yang dilakukan sekarang ini, karena kalau dilihat jaman Jepang itu jam 10.00 waktu Tokyo yang berarti jam 11.00 waktu sini (Indonesia).

Masalah penjernihan yang faktual ini juga saya rasa perlu. Dengan mengundang Badan Meteorologi dan Geofisika pada waktu upacara 17 Agustus 1945, mereka itu melakukan pengukuran cahaya dari jam 06.00 pagi sampai dengan jam 10.00 siang. Namun sudah terdapat kejernihan, artinya kalau jam 09.45, jam 09.00, atau jam 10.15, jam 10.00 itu di tengahnya. Jadi bisa direkonstruksi dengan hitungan-hitungan me-

makai, melihat beberapa bayangan dari rumah Pegangsaan Timur itu kemudian diukur kembali, yang akhirnya sudah tercapai dan sekarang kalau Pemerintah merayakan 17 Agustus jam 10.00 sudah tidak ragu-ragu lagi. Ini sebagai suatu ilustrasi di mana masyarakat sudah menyadarkan kita bahwa penjernihan itu perlu.

Kemudian penjernihan yang bersifat faktual masih banyak masalah, karena ini menyangkut interpretasi. Jadi masih banyak tokoh-tokoh, baik yang sifatnya kontroversial maupun informasi yang diterima sejarawan itu tidak sampai. Jadi kita introspeksi sendiri bahwa kadang-kadang kelemahan kita itu akibat informasi tidak sampai. Itulah akibatnya bahwa memang sejarah kontemporer itu banyak mengalami kritik. Dari kritik yang lunak sampai yang cari makian, sama sekali tidak pernah mendapat pujian. Walaupun kita sudah bekerja menurut prosedur yang berlaku.

Yang terakhir adalah saya ingin menyarankan:

- 1) Memang diakui atau tidak diakui bahwa memang tenaga sejarawan itu kurang, terutama yang muda-muda ini saya kira perlu ditambah untuk masalah penjernihan.
- 2) Memang masalah penjernihan ini jangan sampai mengeruhkan lagi, artinya bahwa memang setelah dijernihkan ini benar-benar representatif, jangan menimbulkan masalah lagi, misalnya: masalah biografi, perlakuan terhadap tokoh, atau pembuat biografi.
- 3) Memang kita jernih tapi mesti berwarna, sudah barang tentu warnanya warna Pancasila. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang didapatkan dalam praktek yang isinya tidak pernah mendapat pujian atau senyuman, yang isinya bawa pesan dan makian. Semua ini diterima sebagai konsekwensi yang selalu hidup atau berkancah dalam sejarah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Dr. Andre Hardjana

Terus terang saja, ketika saya diminta untuk membahas masalah ini agak ragu-ragu, karena waktunya sangat mendesak dan kedua saya bukan sejarawan. Selanjutnya saya tidak akan memberikan pengarahan karena biasanya pengarahan itu permulaan yang diberikan oleh Dirjen; jadi saya ini cuma bercerita dan ini di kalangan para sejarawan mungkin bisa menarik.

Cerita pertama yang akan saya sampaikan, dan ini saya ambil karena pembicaraan-pembicaraan tadi malam dalam usaha Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.

Cerita Pertama adalah sesuai dengan latar belakang saya, yaitu tentang Yunani; suatu drama Yunani yang mengisahkan kayangan (Avtrion) itu terjadi seperti cerita berikut. Mahadewa Sis, seperti dewa-dewa lain, maha artinya rakus. Ia mencintai istri seorang petani. Untuk mendapatkan istri ini ia mengubah dirinya menjadi petani, sehingga pada malam tanggal mainnya terjadilah perdebatan; siapa petani yang sebenarnya, karena istrinya juga bingung. Sehingga dua petani ini harus membuktikan bahwa dirinya itu petani, apa ciri-ciri khas dari dirinya yang menyebabkan dia itu petani suami dari istri yang cantik itu.

Dan karena ceritacerita Yunani mengandung moral dan moral di Yunani itu selalu kenalilah dirimu sendiri dan carilah dirimu, maka kita boleh simpati; tetapi petani kalah karena petani itu tidak dapat membuktikan dirinya sebagai petani. Mahadewa yang menjadi petani tahu, karena ia Mahadewa, dia maha tahu, dia bisa menunjukkan karena punya andeng-andeng, dan segala macam tanda yang khas, sedang petani yang mempunyai ciri-ciri itu justru tidak dapat menunjukkan.

Cerita yang kedua terjadi dengan seorang yang sangat ter-sohor sekarang, yaitu Karl Marx, yang saking cintanya kepada rakyat yang tertindas, ia mengadakan penelitian (tahun 1850). Dia menganggap bahwa konsepnya tentang rakyat tertindas sudah jelas, karena itu ia membikin questioner, sebenarnya bukan berarti seperti questioner sekarang, tetapi suatu daftar pertanyaan yang panjang lebar, berisi 103 pertanyaan yang rata-rata panjang 5 kalimat, maklum orang Jerman. Lalu daftar angket ini dikirimkan kepada 25.000 buruh yang dianggap sebagai rakyat tertumpas di Perancis dan dicetak dalam majalah yang disebut Revolusi Sosialis, majalahnya kaum sosialis. Pokoknya kampanye besar-besaran dan hasilnya tidak ada yang kembali.

Jadi, saya kira ini ada dua cerita yang menarik bagi kita semua, yaitu yang pertama adalah kita perlu selalu menjelaskan sebenarnya, kita itu siapa dan mau apa, haruslah dibikin jelas, karena kita bisa kehilangan isteri seperti petani itu. Kalau tidak tahu diri kita dan kita tidak akan juga bisa menolong atau memecahkan persoalan yang kita anggap jelas. Apabila kita sendiri tidak membikin jelas, orang lain tidak mengetahui kita.

Oleh karena itu, karena tadi malam itu untuk pertama kalinya saya mendengar kejernihan DIP, kejernihan filter, penjernihan seperti kalau PAM itu adalah penjernihan air, lalu air dijernihkan dan macam-macam yang lain.

Saya kira memang ada baiknya kalau didalam pembicaraan, terutama di dalam hal-hal yang menyangkut nilai-nilai, ini kita cukup jelas. Kalau kita kembali kepada soal penjernihan

tadi, rasanya saya mendapat kesan dan saya bukan ahli sejarah. Saya mendapat kesan, seolah-olah memang ada alasan bagi para sejarawan untuk mengadakan penelitian lagi dan ini namanya sesuai dengan ajaran para metodolog yang mengatakan: "Bahwa apabila Saudara-Saudara itu sudah tidak percaya kepada teori yang lama maka Saudara perlu mengadakan penelitian". Jadi, kalau kita sampai suatu saat bahwa kita itu merasa tidak bisa mempercayai teori yang lama atau bahwa teori yang lama atau mungkin katakanlah dosen kita seperti tadi malam dikatakan itu sarjana standard, itu memang dianggap tidak bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya, maka kita perlu mengadakan penelitian. Jadi ini saya anggap penjernihan itu mungkin karena itu.

Kemungkinan kedua kita mengadakan penelitian karena kita mengalami ideologi baru atau kita menghayati ideologi baru atau menemukan ideologi baru. Seperti dalam kasus Karl Marx itu jelas, bahwa minatnya adalah tentang rakyat tertindas, sehingga ia mengadakan penelitian dan dia tidak mempercayai penelitian sebelumnya, dianggap ini ada ideologi baru dan kebetulan metodenya adalah *Historis Materialisme*, mementingkan sejarah, paling sedikit menurut dia. Jadi dengan adanya ideologi baru ini kita perlu mengadakan penelitian dan mungkin juga istilahnya penjernihan. Saya tidak tahu apakah kita dalam masa menemukan ideologi baru itu sekarang, itu tentu saja suatu kemungkinan masalah politik, tetapi itu juga karena pada saat kemudian.

Kemungkinan yang ketiga, mungkin kita itu dalam pengalamannya, pengalaman hidup kita, menghadapi macam peristiwa yang kita anggap penting dan kita merasa bahwa itu perlu dipecahkan. Karena apabila tidak dipecahkan resikonya besaar bagi masyarakat, jadi kita mengadakan penelitian, tentu saja kita, saya tidak akan menunjukkan mana yang kira-kira mendorong kita atau mungkin dalam hal ini proyek ini (PKPS), bahwa kita perlu mengadakan penjernihan dan kesadaran sejarah itu.

Catatan dasar yang kiranya perlu dipergunakan sebagai

pangkal tolak dari setiap peneliti adalah bahwa sebenarnya peneliti itu tidak tertarik pada benda atau peristiwa itu secara utuh, sekelompok sekongkrit-kongkritnya. Tetapi hanya tertarik pada dimensi-dimensi, aspek-aspek atau mungkin atribut atau kalau dalam bahasa Inggris disebut *propeties* atau sifat-sifat. Seandainya kita menokohkan seseorang yang sudah disebut tadi malam (Jenderal Sudirman), bukan karena dia pangkatnya Jenderal dan itu Sudirman, tetapi karena perbuatan-perbuatannya, karena sifat-sifatnya, mungkin karena tingkah lakunya, mungkin karena tekadnya, mungkin karena keadaan pisiknya yang demikian, tapi jiwanya luar biasa. Dan biasanya kecenderungan dari sifat-sifat besar ini bisa dihubungkan satu sama lain dan itu dianggap bisa memberi penjelasan terhadap masalah yang ingin digarap. Jadi sekali lagi, sebenarnya mungkin sedikit berbeda kalau kita jatuh cinta. Ini contoh biasa yang lebih mudah untuk dibicarakan mengenai masalah yang sedikit pelik. Kalau orang jatuh cinta, kalau ditanya, apa yang menyebabkan dia jatuh cinta, tentu saja sulit dan itu baru kemudian bisa disebutkan satu persatu mengapa. Oleh karena itu nyanyian Indonesia menyatakan "apanya dong", jadi apa yang menyebabkan dia jatuh cinta. Apakah karena kecantikannya, apakah karena hatinya, apakah karena yang lain, lalu katanya, semuanya.

Dalam penelitian itu tidak mungkin. Memang prinsip dari ilmu pengetahuan yang mendasar yang saya kira digunakan dalam sejarah adalah prinsip deterministis, yaitu bahwa ilmu itu pada dasarnya terikat pada determinisme, yaitu setiap peristiwa apapun terjadi karena ada sebabnya dan sebabnya itu bisa dicari. Itu tidak berarti bahwa sebabnya itu sudah dimengerti, tapi bisa dicari. Sebabnya boleh banyak dan mungkin kita tidak akan mengetahui semuanya, tetapi ilmu pengetahuan prinsipnya mencari beberapa yang dianggap penting dan dengan prinsip sebenarnya kita sedikit lebih jelas.

Tujuan menguraikan atau menjelaskan itu apa di dalam sejarah ini dan kalau toh kita memberikan diskripsi tidak akan lengkap. Setiap peristiwa yang dianggap penting pasti kompleks

dan kita tidak bisa menemukan semuanya. Dan sebagai peneliti hanya berhasil apabila menemukan faktor-faktor yang dianggap penting, bukan faktor-faktor tambahan yang dimasukkan, dan biasanya, sebagai peneliti tentu saja harus mengembangkan alat-alat yang mencirikan obyek atau peristiwa-peristiwa yang akan ditelitinya.

Uraian ini mungkin sangat sederhana, tetapi saya kira masih ada relevansinya kalau kita berbicara tentang masalah-masalah seperti tadi malam dibicarakan. Biasanya kita perlu sekali lagi mempertanyakan, apakah proses penelitian kita itu memang berjalan wajar.

Aliran-aliran dalam peristiwa-peristiwa, proses-proses penelitian tentu saja bermula dari apa yang disebut konseptualisasi, mencari konstruksi atau mencari nama apa saja yang dianggap masih kabur. Untuk menyebut beberapa cerita yang dianggap umum dan bisa dipersatukan.

Kalau seorang gadis mendapat tamu tertawa terbahak-bahak maka ibunya akan mengatakan (tentunya sesudah tamunya pergi), "itu tidak baik". Kalau seorang gadis kebetulan makan dalam pesta keluarga sampai mengambil tiga kali, ibunya juga akan bilang "itu tidak baik". Dan kalau seorang gadis pergi dengan pacarnya, baru pulang jam dua malam, juga akan ditegur "itu tidak baik".

Tentu saja, karena gadis ini bukan peneliti, dia akan mengatakan ibu sudah kuno dan cerewet. Tetapi kalau ia seorang peneliti, dia akan berfikir apa hubungan dengan seorang wanita dengan makan mengambil tiga kali dikatakan, "tidak baik", tertawa terbahak-bahak dikatakan "tidak baik", dan pulang larut malam juga "tidak baik".

Rasanya kalau dia seorang peneliti dan paling sedikit kalau ia ingin memperbaiki dirinya, ia akan berfikir. Oh mungkin yang dimaksud itu, saya ini harus kembali kepada kewanitaan atau mungkin adat ketimuran atau mungkin itu kesopanan.

Jadi harus mencari sesuatu yang kiranya bisa mengikat bahwa peristiwa ini menjadi seolah-olah satu konsep. Dan untuk meyakinkan dirinya tentu saja dia mencari apakah hal-hal yang semacam itu di dalam kepustakaan sudah pernah terjadi atau belum. Karena seseorang tidak pernah mengalami sesuatu yang istimewa yang orang lain tidak pernah mengalami terutama di bidang ilmu. Sehingga perlu kembali mempertanyakan apakah istilah macam ini ada atau mungkin, apakah istilah yang seperti ini digunakan untuk menyebut beberapa peristiwa lain, ataukah peristiwa-peristiwa semacam ini disebut dengan istilah lain. Dengan kata lain sebenarnya ingin mengecek apakah ada inter subjektifity dengan orang lain atau tidak. Kalau dia menggunakan konsep-konsep itu yang menjadi masalah adalah kemudian di dalam pengukuran konsep-konsep itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Ini merupakan proses yang sebaliknya, yaitu yang disebut konsep, mungkin penjabaran atau pendefinisian.

Tahap-tahap pendefinisian biasanya akan menyangkut hal-hal yang sangat peka. Tahap pertama disebut tahap tingkat atas atau sering disebut konseptual definition. Ini biasanya bersifat abstrak dan bisa bersifat universal. Meskipun menggunakan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah permitif, artinya istilah-istilah yang sudah disepakati. Jadi, meskipun bisa memberikan pengetahuan, bisa bersifat abstrak dan bisa bersifat universal. Akan tetapi konsep yang didefinisikan secara abstrak biasanya sulit diteliti. Di dalam penelitian akhirnya kita harus berurusan dengan konsep-konsep yang tidak terlalu abstrak yang harus ada definisinya dan harus jelas batasnya. Oleh karena itu biasanya lalu peneliti membuat definisi yang kedua yang disebut mungkin definisi tingkat menengah atau yang biasanya disebut konstitutif defination. Definisi yang mengikat elemen-elemen apa yang ada dalam konsep tersebut. Dan ini, pada hemat saya mulai masuk nilai-nilai sosial, nilai yang khas pada suatu kebudayaan dan adat-istiadat. Semua itu masuk dan sudah mulai mewarnai.

Kemudian peneliti masih harus meneruskan perjalanan yaitu kepada fase yang ketiga, pendefinisian operasional. Hal ini biasanya menyangkut indikator-indikator atau petunjuk-petunjuk dan ini yang biasanya yang kita temukan di dalam kenyataan. Di dalam kenyataan kita tidak berurusan dengan apa itu kepahlawanan, tetapi kita berurusan dengan tingkah laku, kita berurusan dengan kata-kata, kita berurusan dengan perbuatan dan mungkin buah pikiran. Tetapi kita tidak berurusan dengan kepahlawanan, karena yang disebut kepahlawanan itu adalah abstraksi dari macam-macam yang disebut indikator itu. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau orang turun dari definisi konseptual atau definisi menurut istilah Himpel, Real definition ke definisi yang konstitutif, artinya yang terdiri dari elemen-elemen bidang-bidangnya yang turun kepada indikator, dan ini biasanya tidak pernah tuntas. Sehingga resiko yang akan ditarik sebagai kesimpulan memang cukup serius.

Dan saya kira langkah-langkah ini sangat penting juga di dalam sejarah. Karena kalau kita mendefinisikan seperti kepahlawanan yang selalu dibicarakan, lalu menyangkut sebenarnya elemen-elemen yang paling mendasar itu apa dan ungkapan yang lain itu hanya tambahan.

Dan kesulitan dengan definisi terutama definisi konstitutif dan operasional ini akan menyangkut tidak hanya perbedaan budaya dari yang satu dengan yang lain, tetapi juga dari sub budaya yang satu ke sub budaya yang lain dan bahkan dari generasi satu dan generasi yang lain dan dalam budaya yang satu, yang sama dalam waktu yang berbeda.

Seorang Sudirman tentu saja bisa dilihat macam-macam seginya, macam karakteristiknya, macam sifatnya, tetapi bagi orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda yang tidak seaman dengan Jenderal Sudirman, dia berdiri di sini, dia tidak mempunyai buku lain, yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi. Dan kalau ia harus melihat Sudirman, ia harus melihat

apa-apa saja yang sangat essensial, sangat mendasar, sehingga kualitas Sudirman itu tidak dilihat seolah-olah sekian, tetapi hanya sekian.

Demikian juga kalau kita disuruh menjelaskan G 30 S, kita masih bisa membicarakan yang kompleks, karena kita semua berurusan, kita harus menunjukkan kata bebas G 30 S. Tetapi anak-anak zaman sekarang yang masih muda, ia akan melihatnya makin kecil, karena pengalaman sudah lain dan kapasitasnya sudah lain. Jadi seolah-olah ada perbedaan dalam pendefinisian. Ini kemungkinan perbedaan karena Kuhor, artinya angkatan-angkatan. Di samping itu karena adanya waktu, karena kesulitan akan mencari nilai dari Sudirman yang dikatakan Pahlawan.

Untuk ini kita harus menemukan elemen-elemen mendasarnya. Semakin lama tokoh itu akan semakin dicirikan dengan elemen-elemen yang mendasar. Mungkin orang di sini, yang sezaman akan mengatakan, dia tidak mengakui orang tuanya. Tetapi kalau orang yang ahli sejarah bisa menjelaskan, karena dulu kalau orang masuk sekolah, kalau orang tuanya tidak terlalu kaya dan tidak Raden Mas ke atas tidak bisa sekolah. Oleh karena itu perlu diangkat oleh orang yang berhasil. Apakah itu Oomnya atau tetangganya, tidak peduli, mungkin kelak menjadi mertuanya.

Dalam proses ini saya tidak tahu, kemungkinan apakah ada tentang Bapak Sudirman semacam itu, saya tidak tahu. Jadi ini mungkin sekedar, tidak mau mengakui orang tuanya. Tetapi dalam budaya waktu itu konteksnya masih luas dan kalau konteks itu memang dijelaskan, saya kira tidak akan semudah itu.

Ada satu contoh yang menarik, kalau tidak salah ada orang yang bernama Boland (siapa?). Ia meneliti keadaan zaman Romawi dan yang ditelitinya tentu saja yang masih ditinggalkan dari zaman Romawi, antara lain adalah nisan-nisan di kuburan.

Seandainya hanya melihat nisan yang ada di kuburan, maka bisa disimpulkan, artinya tanpa berpikir panjang tentang

kontek pada waktu itu, ia akan menyimpulkan bahwa lelaki zaman Romawi bukan main cintanya pada istrinya. Karena apa, karena boleh dikatakan hampir semua nisan itu tentang istrinya, istrinya siapa, waktu jabatannya, tanggal hidupnya kapan.

Dan apakah harus disimpulkan bahwa wanita-wanita Romawi tidak mencintai suaminya. Ternyata dari data yang dikumpulkan pada waktu itu, kalau istri meninggal sebelum suaminya, biasanya suaminya masih kaya dan bisa mendirikan nisan yang lumayan yang tahan lama. Sedangkan kalau suaminya sudah meninggal, istrinya sudah tidak bisa apa-apa, sehingga tidak bisa memberikan penguburan yang layak. Oleh karena itu nama suaminya meskipun cukup tinggi tidak tercantum di dalam deretan-deretan nisan yang ada. Dan yang mencantumkan hanyalah orang yang sangat penting karena itu urusan negara. Tentu saja, kalau kita kembali kepada kepahlawanan terutama dalam zaman pembangunan ini, terutama anak cucu kita akan kesulitan menafsirkan yang macam ini, khususnya akan menafsirkan administrasi negara kita. Karena apa, sekarang yang namanya inskripsi (prasasti) luar biasa banyaknya dan yang sering menanda tangan itu tidak ada hubungannya dengan departemennya, misalnya peresmian Stasiun TVRI di Nusa Tenggara Timur yang menanda tangani Kopkamtib. Dan nanti akibatnya, kalau tidak tahu sistem yang berjalan sekarang.

Begitu juga kalau mencari pahlawan zaman modern. Kalau yang logis pergi saja ke Taman Pahlawan untuk mencarinya. Tetapi kita tahu bahwa Presiden yang pertama dan Wakil Presiden tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena itu kita perlu tahu sistem yang semacam itu dan kalau demikian kepahlawanan tentu saja tidak bisa dilihat dengan indikator dimakamkan di Taman Pahlawan atau tidak. Indikator-indikator ini erat sekali hubungannya dengan kebiasaan kita, dengan nilai kita, dan ini makin lama akan disisihkan secara lebih kritis.

Dalam hubungannya dengan menulis pahlawan. Seorang pahlawan mau dipahlawankan ragu-ragu karena istrinya banyak.

Memang pada waktu itu belum ada Peraturan Pemerintah No. 10, itu baru sekarang. Dan yang perlu diketahui apakah istrinya banyak pada waktu itu bukanlah merupakan nilai. Kita ambil saja Wayang yang netral, yang tidak ada politiknya. Yang namanya Bima atau Werkudoro, itu digambarkan sebagai orang yang saking jujurinya sampai unggah-ungguh saja tidak punya. Karena unggah-ungguh itu dianggap sebagai pemolesan hati, maka dia tidak bisa bahasa kromo inggil, bahasa kromo madyo juga tidak bisa, bisanya cuma ngoko yaitu bahasa yang paling jujur. Tetapi dia masih diakui sebagai kesatria, dia pahlawannya Pandowo Limo, itu kejujuran.

Kejujuran yang lain dicarikan oleh yang namanya Puntodewo, saking jujur dan melekatnya istrinya diambil oleh orang lainpun boleh. Dan saya kira, kalau itu diceritakan pada anak sekarang tentu akan dibilang raja itu gila, masak istrinya diambil orang lain kok boleh, tidak bertanggung jawab, atau mungkin tidak mencintai istrinya. Ini saya kira ada nilai yang melekat yang perlu dipertimbangkan. Karena itu saya kira kita tidak perlu selalu terikat, karena kita mempunyai nilai. Segala sesuatu yang kita ceritakan harus dengan nilai dan indikator-indikator kita yang sekarang.

Hal ini saya kira suatu masalah dalam sejarah yang serius. Jadi tentang istri banyak, saya kira setiap orang mengagumi Arjuna. Dan tidak ada yang tidak mengakui bahwa dia itu satria. Kesatria dalam artian wayang Jawa, meskipun mungkin kalau kita menghitung istrinya tidak bisa saking banyaknya. Karena ia kesatriannya, semua wanita di dunia ini kalau melihatnya jatuh cinta.

Dan kalau ini diceritakan pada anak-anak kita, itu dikatakan si Children of God, indikatornya sudah lain. Juga yang masih dari wayang suatu hal yang ingin saya sebutkan adalah dari Raden Gatotkoko. Kita selalu mempunyai image dan dalam kebiasaan kita dan mungkin dalam kebudayaan kita sebenarnya, bahwa yang disebut suci itu biasanya putih, paling sedi-

kit kuninglah. Dan kalau ada orang hitam, wah ini musti jahat. Tetapi di dalam wayang yang namanya Gatotkoco yang jujur, yang pahlawan itu digambarkan sebagai orang hitam, artinya wajahnya itu item meles. Kalau ayam tidak ada warna lain, pokoknya mulus.

Dalam pemikiran wayang yang dinamakan ketulusan itu tidak bisa dilihat, saking jelasnya sampai tidak tampak seperti kegelapan malam. Jadi kita terikat pada image-image yang sudah kita miliki. Kalau mau nampak bersih mau terpandang pakaiannya harus putih dan seterusnya. Dalam kebudayaan Jawa sudah tertanam sejak dahulu seperti dalam istilah seseorang termasuk klas gagak atau bango (dandang), artinya anda itu termasuk klas yang boleh berpakaian putih atau tidak, demikian berpakaian saja diatur.

Ada kebiasaan, kalau seorang rendah atau klas gagak (Pak Kromo) yang khususnya bercelana hitam, dia pakai celana putih, dia bisa ditegur. Hal ini adalah suatu masalah, mungkin dalam penulisan sejarah kita perlu juga menunjukkan nilai-nilai yang berkaitan dengan indikator-indikator yang pada waktu itu ada yang mungkin berbeda dengan indikator-indikator kita sekarang, tetapi nilainya diakui sama.

Jadi berurusan dengan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah saya kira mungkin ada baiknya, sebenarnya kalau sekali-kali para ahli sejarah ini tidak menggantungkan dirinya saja pada dokumen-dokumen, mungkin meneliti lapangan. Dan ini saya sampaikan hanya sebagai kebiasaan orang ilmu sosial yang kebiasaannya begitu. Mungkin ada baiknya kalau kita misalnya mau meneliti tentang kewaspadaan nasional atau tentang persepsi masyarakat tentang komunis, karena kita semua anti komunis. Kita bisa meneliti, sebenarnya yang diamati itu apanya. Apakah komunis sebagai ideologi, atau komunis sebagai PKI, yaitu organisasi yang notabene saingan partai lain atau komunis itu karena atheis atau karena apa. Pokoknya yang sebenarnya dianggap paling rawan dalam ideologi komunis itu apanya.

Apa yang paling rawan dari ideologi komunis itu sebenarnya. Apakah Karl Marx dalam organisasinya, tetapi kalau ideologinya tidak apa-apa. Orangnyanya itu baik-baik misalnya. Ini mungkin kita bisa melihat tahapan-tahapan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan juga tahapan-tahapan kesadaran tentang persoalan yang ada.

Kalau misalnya komunis itu bahaya latent yang sangat penting, saya kira itu ada baiknya diteliti yang macam itu, tentu saja kalau ada izin.

Kemudian yang juga perlu diketahui di dalam menafsirkan variabel-variabel atau indikator-indikator itu supaya kita cukup teliti. Kita perlu mempertanyakan sebenarnya variabel-variabel atau yang sudah diturunkan menjadi indikator-indikator itu. Apakah merupakan ciri-ciri pribadi atau ciri-ciri sosial dan kelompok. Kalau misalnya merupakan ciri-ciri pribadi perlu dipertanyakana, apakah itu merupakan absolut properties.

Kalau orang dikatakan populer, popularitas itu diperoleh karena hubungan. Demikian juga semangat sosialitas, orang yang dianggap sosial, termasuk yang sok sosial. Hal itu karena penilaian antara yang tidak sosial dan penilaian yang berhubungan yaitu dia menyatakan tidak sosial, sehingga akhirnya dikatakan sok sosial. Ini jelas karena ada hubungan. Tetapi juga ciri-ciri seperti yang disebut keibuan. Orang disebut keibuan tentu saja kalau ada anak, orang yang sifat keibapakan karena diasosiasikan dengan anak, juga atau yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Dan ini juga karena ada hubungan dengan orang lain. Apakah suami yang bertanggung jawab atau isteri yang bertanggung jawab. Kemungkinan yang ketiga perlu dipertanyakan, apakah ciri-ciri itu ciri-ciri komparatif, artinya karena kedudukan di dalam masyarakat atau di dalam urutannya. Misalnya kalau seseorang sebagai anak sulung tentu saja kedudukannya khas, sehingga sifat sebagai anak sulung itu dianggap sebagai ciri-ciri komparatif. Demikian juga anak bungsu, kalau dibandingkan dengan di tengah bagai-

mana. Sebagai anak sulung dan tentu saja yang lain bisa dicari. Dan ini biasanya lalu dihubungkan dengan misalnya kemajuan, karena ia anak sulung atau mungkin juga keras kepala. Ia bukan karena sudah tua dan Profesor terkenal, tetapi dia itu juga sebagai anak sulung.

Atau dipertanyakan kemungkinan terakhir, apakah bukan ciri-ciri kontekstual, yaitu ciri-ciri sebagai anggota suatu kelompok. Misalnya kalau sarjana lulusan Fakultas Sastra Gajah Mada, tentu saja dengan pengertian karena terkenal, ia akan menduduki kedudukan kunci. Atau Sastra Universitas Indonesia, mempunyai kedudukan kunci. Sehingga kalau Saudara menyatakan, "bahwa saya sarjana lulusan Sastra UI", kemungkinan akan punya pangkat atau mungkin akan mempunyai sifat radikal atau mungkin akan mempunyai sifat konservatif atau mungkin mempunyai sifat nasionalistis. Ini karena ciri-ciri kontekstual.

Kalau misalnya ciri-ciri itu merupakan ciri-ciri kelompok atau ciri-ciri sosial maka perlu dipertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat untuk mempermudah penafsiran supaya tidak kacau. Jadi perlu dipertanyakan di dalam ciri-ciri sosial dan kelompok, apakah ciri-ciri kelompok itu merupakan ciri-ciri analitis, misalnya pemerataan. Pemerataan itu merupakan satu konsep yang kalau di dalam statistik berarti standard debiasi (rendah atau kecil). Kalau misalnya kita melihat bahwa orang sekarang bersifat konsumeristis, 99,99% mungkin kita yakin bahwa pemerataan kecil. Karena di dalam masyarakat yang standard debiasnya besar, orang-orang menengah rendah biasanya ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu mempergunakan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa mengangkat derajatnya, yaitu yang bisa dianggap cukup tinggi.

Jadi bilamana pemerataan ini standar debiasnya besar maka konsumerisme itu memang akan merajalela. Tetapi kalau pemerataan itu memang besar biasanya tingkat konsumerisme itu tidak terlalu menyolok. Kemungkinan yang kedua perlu di-

pertanyakan, seandainya itu bukan ciri-ciri analitis, kemungkinan adalah ciri-ciri konstruktural, hubungan warga dengan kelompok. Ini saya kira sangat penting menulis biografi pahlawan, yaitu tentang bintang klas, tentang bunga desa atau bunga kampung atau mungkin melati Senen. Maksudnya adalah kalau orang dikatakan terlalu cantik, mungkin paling cantik. Ini namanya struktural dibanding dengan yang lain-lain. Jadi pahlawan-pahlawan dikatakan pahlawan, karena apanya, apakah karena kejayaannya.

Juga masih ciri-ciri kelompok, perlu dipertanyakan kemungkinan ketiga, apakah itu ciri-ciri yang disebut ciri-ciri global, yaitu ciri-ciri yang menunjukkan keseluruhan. Misalnya kalau Anggaran Belanja Negara itu sekian, orang bisa menduga bahwa negara itu berkembang. Kalau budget kesehatan berapa, itu bisa diduga bahwa masyarakat, kelompok atau masyarakat atau kampung itu terisolir. Demikian juga budget wajib belajar. Hal yang demikian ini perlu diperhatikan supaya di dalam membikin penafsiran tidak terlalu jauh dari kenyataan.

Perlu disadari adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang mungkin salah tempat, dan itu secara sistematis. Sumber-sumber informasi dianggap benar tentu saja akan diikuti dan itu ada beberapa jenis.

Jenis yang pertama sumber informasi yang selalu dikatakan benar itu adalah sumber kepercayaan. Metodenya biasanya menggunakan keteguhan iman dan tarohlah kelengketan. Dan ini karena sudah telanjur, bagaimana lagi. Sebagai contoh, sumber-sumber informasi yang semacam ini adalah adanya pengertian, kalau orang sakit itu adalah hukuman dari dosanya. Tetapi tidak dicari sakitnya itu apa. Lalu mencari mungkin ada janji-janji atau kaul yang belum dipenuhi dan mungkin dewata marah atau mungkin Tuhan marah, sehingga perlu didamaikan dan untuk mendamaikan itu mungkin perlu duduk di bawah pohon beringin di alun-alun. Dan perlu menyembelih hidangan ayam mulus yang putih, dan seterusnya. Kepercayaan ini sulit dirubah, seolah-olah sudah tertutup dan keras kepala.

Yang kedua selalu mempercayai orang lain karena kewibawaan, sumbernya adalah sumber kewibawaan. Metodenya sedikit jelek, namanya membebek. Karena Sang Empu sudah bilang begini; beginilah kenyataan dunia ini. Karena atasan bilang begitu, ya begitulah saya harus bilang. Ini sebenarnya sedikit terbuka, cuma tidak mempunyai pendirian. Jadi tidak mengetahui apakah sumber itu betul-betul benar atau tidak, cuma dianggap benar, dan daripada repot-repot, benarlah. Jadi seolah-olah kenyataan yang ada di dunia ini. Peristiwa-peristiwa sejarah itu harus terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. A. atau Prof. B., tidak seperti yang ditentukan dalam dokumen-dokumen yang lain. Karena kita memang tidak pernah mengumpulkan dokumen yang lengkap dari semua yang penting-penting itu.

Dan sumber yang ketiga, yang mungkin bisa sebagai sumber informasi yang benar apa yang disebut *akal sehat*. Kita menganggap benar karena masuk akallah. Dan yang menjadi persoalan di sini adalah halnya siapa. Karena masuk akal itu selalu ditentukan oleh kebudayaan dan oleh adat istiadat. Apa yang masuk akal di Jawa mungkin tidak masuk akal di Tapanuli.

Lalu sumber informasi yang lain yang disebut sumber empiris atau sebenarnya sumber data, data kenyataan. Metodenya tentu saja disebut metode ilmiah. Dengan pengertian bahwa kenyataan dunia ini adalah sebagaimana adanya dan bukan seperti yang digambarkan di kepala.

Dengan kesadaran untuk mencari data tentu saja ada beberapa metode yang bisa ditempuh sesuai dengan tujuan. Apakah akan mengadakan interview atau mau mengadakan penelitian terhadap sumber-sumber dokumen dan lain-lain. Perlu menyadari bahwa dokumen yang kita temukan itu adalah sebenarnya dibuat bukan untuk kepentingan kita. Kita hanya harus memanfaatkannya, seandainya itu memang bisa dimanfaatkan.

Dalam hal ini saya tidak memberikan hal yang menarik, tetapi mungkin sedikit bisa dipertimbangkan dalam usaha penjernihan dan kesadaran sejarah. Karena saya bukan historikus

dan saya tidak mendalami betul tentang metode penelitian di dalam sejarah. Tetapi semua catatan-catatan yang penting dan mendasar ini perlu kita pergunakan, paling sedikit laporan kita atau hasil kita memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membikin katagori, dia memang pahlawan atau tidak pahlawan. Dan alangkah baiknya kalau bisa memberi penjelasan, artinya ada kaitan yang satu dengan yang lain. Dan perlu dipertanyakan apakah kaitan itu memang kaitan yang real atau dalam ilmu sosial disebut semu, karena kedua-duanya menjadi akibat dari sumber yang lain yang ada di luar.

Kalau kita lihat anak-anak, gadis-gadis di Jakarta pakai celana pendek dan makan es krim, tentu saja kita tidak akan menyimpulkan bahwa anak-anak yang bercelana pendek itu cenderung makan es krim. Sehingga anak supaya tidak terlalu gemuk di larang pakai celana pendek. Tetapi perlu dipertanyakan bahwa udara Jakarta karena polusi semakin panas, sehingga orang tidak tahu terpaksa pakai celana pendek dan untuk mendinginkan meskipun masih bercelana pendek perlu makan es krim.

Dan yang penting yang perlu disadari bahwa ada yang lain di dalam hal ini, mungkin kamarnya perlu diberi AC. Jadi yang perlu disadari apakh kaitannya real atau tidak. Dan syukurlah kalau peneliti kita bisa digunakan untuk ini.

Lampiran 1

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN PROYEK PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH

I. Pendahuluan

Pembinaan kesadaran sejarah masyarakat memerlukan sarana, prasarana, personil dan sistimatika yang memadai agar tidak menjurus kearah yang tidak diinginkan. Dalam kenyataan disamping kekurangan guru sejarah yang benar-benar memadai, bacaan dan sumber informasi kesejarahan untuk pendidikan di sekolah-sekolah masih jauh dari mencukupi. Demikian pula kemampuan penulis untuk mengungkapkan nilai-nilai kesejarahan perlu ditanamkan pada masyarakat melalui buku-buku, pertunjukan-pertunjukan dan media massa lainnya masih belum dapat diandalkan. Apalagi sistimatika penyebaran dan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah.

Pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang baru merdeka dan bersatu diperlukan secara terus menerus dan terarah. Upaya pembinaan kesadaran itu bukan hanya didorong oleh karena mudanya usia sebagai satu bangsa, melainkan juga karena kenyataan bangsa Indonesia terwujud sebagai satu kesatuan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu kesadaran sejarah bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan rasa persatuan yang telah dilandasi oleh kebersamaan cita-cita, melainkan juga peningkatan kesatuan di atas kemajemukan.

Kenyataan tersebut telah mendorong pemerintah dan rakyat Indonesia untuk secara terus menerus membina persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain dengan usaha

peningkatan kesadaran sejarah masyarakat sebagaimana yang tercermin dalam GBHN yang antara lain menyatakan :

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa".

Sehubungan dengan usaha pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah maka Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan (Rapat Kerja) dengan sejarawan, cerdik-pandai serta tokoh-tokoh masyarakat yang dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dalam penelitian lapangan proyek membentuk tim peneliti dan menugaskannya untuk mendapatkan informasi dan mencari data-data yang berhubungan dengan pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah dari seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut telah dilakukan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 1984.

Dalam kegiatan ini para peneliti telah melakukan pengamatan dan mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru (guru SD, SMPT, SMTA), dosen, mahasiswa dan pelajar. Dari kegiatan tersebut proyek telah memperoleh hasil berupa masalah-masalah, pemikiran serta saran yang berkenaan dengan kepentingan pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah.

II. Masalah-masalah

1. Pada umumnya kalangan masyarakat luas perhatian serta pengetahuan tentang kesejarahan, khususnya Sejarah Nasional Indonesia sangatlah terbatas, kecuali orang-orang yang berkecimpung di lingkungan lembaga/instansi yang tugasnya khusus menangani bidang kesejarahan. Bahkan ada kalangan mahasiswa kurang

begitu memahami, apalagi menghayati arti sejarah bangsanya. Hal ini terutama yang menyangkut pahlawan bangsa dan peranan kerajaan-kerajaan yang hidup pada masa sebelum lahirnya kebangkitan nasional. Alasannya, karena mereka tidak mendapat pelajaran sejarah secara khusus. Dan karenanya tidaklah mengherankan bahwa untuk menanamkan kesadaran sejarah bagi mereka tersebut kiranya amatlah sulit.

2. Di pihak lain, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang telah memiliki kesadaran sejarah yang tinggi melihat kedudukan sejarah daerah dalam Sejarah Nasional baik itu untuk konsumsi umum maupun untuk kepentingan pendidikan kurang mendapat tempat yang semestinya, sehingga Sejarah Nasional kita belumlah lengkap dan sempurna.

Seharusnya untuk membina sejarah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di daerah perlu mendapat perhatian yang serius, karena peristiwa-peristiwa yang heroik dan patriotik di daerah merupakan kebanggaan tersendiri bagi putra-putra daerah yang bersangkutan. Nilai-nilai perjuangan tersebut merupakan bahagian dari perjuangan bangsa yang mengandung rasa persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan hal itu maka diharapkan penulisan Sejarah Nasional Indonesia di masa mendatang perlu disempurnakan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

3. Sementara itu patut dibanggakan, karena kalangan muda seperti terlihat pada pelajar SMTA Kalimantan Selatan, khususnya Kodya Banjarmasin bahwa minat murid-murid terhadap pelajaran sejarah amatlah tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya minat anak-anak murid yang sedianya dapat diterima pada jurusan IPA, tetapi mereka memilih jurusan IPS karena senang pada pelajaran sejarah.

Minat terhadap sejarah terlihat juga pada mahasiswa FKG Lambung Mangkurat. Mahasiswa yang tidak tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Sejarah mengambil minor sejarah dan hasilnya cukup membanggakan, karena selain mendapat nilai yang baik mereka juga semakin terpicu pada sejarah, khususnya sejarah bangsanya.

4. Dalam kenyataan, bahwa banyak guru-guru sejarah di daerah baik untuk tingkat SMTP maupun SMTA tidak berasal dari lingkungan pendidikan sejarah. Pada umumnya mereka ditunjuk menjadi guru sejarah karena kekurangan tenaga, tetapi ada juga karena mereka senang terhadap sejarah. Sedangkan dalam praktek para guru tersebut banyak mendapat kesulitan, terutama karena kurang ditunjang oleh bahan bacaan kesejarahan yang memadai dan tidak bertumpu pada ilmu kesejarahan yang dalam. Dan akibatnya pengetahuan kesejarahan bagi murid-murid yang diajarnya semakin menipis.
5. Dengan diterapkannya kurikulum 75, matapelajaran sejarah semakin kurang mendapat tempat. Selain itu terasa sulitnya mendapatkan buku-buku pegangan baik untuk guru maupun bagi anak murid, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi guru-guru sejarah di daerah untuk menentukan patokan sebagai pegangan. Hal ini sangat terasa apabila timbul suatu permasalahan yang memerlukan jawaban yang tepat.

Buku-buku paket dan buku anjuran yang diedarkan dari pusat (Depdikbud) penyebarannya kurang lancar dan merata, dan anehnya buku-buku tersebut banyak tersimpan dalam almari/gudang yang menangani penyebarannya di daerah.

Karena itu untuk mengisi kekosongan tersebut maka guru-guru sejarah yang kreatifitasnya tinggi mencoba mencari bahan-bahan seperti yang dituntut oleh kuri-

kulum 75 dan menyusunnya menjadi diktat dan bahan inilah yang diberikan kepada anak-anak. Tetapi hal ini membawa dampak negatif, karena untuk memperoleh nilai yang baik anak murid hanya berpegang pada diktat tersebut dan tidak berminat lagi untuk membaca buku yang lain.

6. Tentang buku paket dan buku anjuran guru-guru memperoleh kesan, bahwa buku-buku tersebut kurang keutuhan logika dalam penyajiannya dan bahasanya terlalu berbelit-belit, sehingga sukar dipahami oleh anak murid. Selain itu masih terdapat kelemahan yang mendasar, terutama simpang siurnya penyajian fakta dan peristiwa yang terdapat dalam buku yang satu dengan buku yang lain. Hal ini selain menimbulkan pertanyaan dari anak murid juga membingungkan guru-guru yang menangani untuk memberikan jawaban yang tepat.

Dan sebagai akibatnya, sebagian anak murid di daerah menganggap pelajaran sejarah tidak lebih dari cerita dongeng yang berguna sebagai hiburan. Dan karenanya tidak mengherankan ada murid yang mengabaikan pelajaran sejarah. Dengan demikian tentu mereka tidak memahami sejarah bangsanya, apalagi menghayati nilai-nilai heroik dan patriotik para pendahulunya dan lebih-lebih bagi murid-murid kejuruan yang sama sekali tidak mendapatkan pelajaran sejarah.

7. Hal lain, berkurangnya minat murid pada pelajaran sejarah karena kurangnya keterampilan guru-guru sejarah memberikan pelajaran tersebut dan ada kesan murid, pelajaran sejarah membosankan. Hal ini karena guru-gurunya kurang mampu menghidupkan suasana yang intim antara murid dengan pelajaran sejarah. Para guru yang kaku dan berpengetahuan sempit dalam kesejarahan tidak jarang melakukan tugasnya dengan

mencatat, disuruh menghapuskan baik tahun maupun peristiwanya. Karenanya murid semakin menjauhi pelajaran sejarah.

8. Dengan dicanangkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) mendapat sambutan yang baik dari kalangan pendidik maupun masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya merupakan beban yang cukup berat bagi guru, terutama karena belum meratanya kesempatan untuk mengikuti penataran dan juga belum tersedianya buku pegangan baik untuk guru maupun murid. Sedangkan buku *Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka* peredarannya sangat terbatas, sehingga tidak setiap orang dapat memilikinya.

Sementara itu banyak guru yang mempertanyakan tentang materi yang akan diberikan atau diajarkan, karena menurut pengamatan mereka belum ada garis pemisah yang tegas antara pelajaran yang diberikan dalam IPS dengan PMP.

III. Saran-saran

1. Sehubungan dengan pembinaan kesadaran sejarah, sebaiknya pelajaran sejarah diberikan sejak masa anak-anak (*Taman Kanak-kanak*). Pelajaran sejarah dimulai dari sejarah daerah dengan menanamkan nilai-nilai perjuangan dari tokoh daerah dan kemudian sejarah bangsa.
2. Penulisan buku pelajaran sejarah nasional supaya dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa perjuangan yang penting yang terdapat pada tiap-tiap daerah.
3. Dalam penulisan buku teks sebaiknya ada ketegasan tentang tanggal, bulan dan tahunnya, sehingga tidak membingungkan anak murid dan guru.
4. Dalam penulisan buku sejarah diperlukan semacam interpretasi normatif tentang Sejarah Nasional. Untuk

hal tersebut diperlukan :

- a. Orientasi yang tepat dalam penulisan
 - b. Seleksi peristiwa yang significance
 - c. Tingkat penjelasan sejarah.
5. Tentang bahasa supaya dipakai bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bertele-tele, sehingga menambah kegairahan bagi anak-anak murid untuk mengenal sejarah lebih jauh.
 6. Khusus buku pelajaran sejarah untuk murid selain uraian yang menarik juga dilengkapi dengan gambar-gambar tokoh, peristiwa serta tempat kejadian lainnya.
 7. Para guru, khususnya guru sejarah diharapkan dalam memberikan pelajaran sejarah dapat memberikan gambaran/dialog dari tokoh untuk dapat menggugah rasa kebangsaan. Dan sebaiknya guru-guru dapat membuat suatu ringkasan/schema dan tidak hanya mencatat saja.
 8. Untuk kepentingan pengajaran sejarah supaya dapat memperbanyak tenaga-tenaga baru yang siap pakai dan guru-guru yang telah ada supaya sering melakukan pertemuan baik dalam seminar atau penataran-penataran. Dengan demikian perkembangan baru dalam kesejarahan dapat diikuti sebagai penambah pengetahuannya.
 9. Dalam pembinaan guru-guru sejarah hendaknya diperhatikan kualitatifnya, serta kepada mereka sebaiknya diberikan bahan-bahan kesejarahan.
 10. Untuk guru-guru sejarah sebaiknya diterbitkan sebuah majalah sebagai wadah untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran untuk pendidikan sejarah ataupun berperan sebagai sumber informasi baru tentang perkembangan ilmu sejarah, khususnya bermanfaat dalam pendidikan sejarah.

11. Buku-buku paket kurikulum 75 sebaiknya dapat disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Dalam hal ini supaya pemerintah segera turun tangan untuk menangani kekurangan buku-buku pelajaran dan buku-buku bacaan di perpustakaan-perpustakaan daerah.
12. Buku-buku hasil sasterawan atau pujangga-pujangga yang berisi gambaran masyarakat masa lalu serta ajaran-ajaran keutamaan supaya dapat dialihbahasakan dan disebarluaskan untuk sekolah-sekolah atau mengisi perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia.

Dan untuk menambah bahan bacaan kesejarahan supaya skripsi para mahasiswa tentang kesejarahan dapat diterbitkan oleh proyek ataupun badan yang ditunjuk.

13. Buku pengetahuan sejarah dapat disebarluaskan secara cuma-cuma. Begitu juga buku-buku hasil penulisan dari Proyek IDSN dan IDKD agar dapat disebarluaskan ke daerah-daerah. Dan bila memungkinkan buku-buku yang telah diterbitkan oleh kedua proyek tersebut untuk penyebarluasannya dapat diterbitkan kembali oleh daerah yang bersangkutan.
14. Para mahasiswa sebaiknya untuk menambah pengetahuan kesejarahan dapat diberikan ceramah-ceramah dari sejarawan-sejarawan Indonesia terutama yang telah dikenal atau telah punya nama. Di samping itu disiapkan diskusi antara PTN/PTS dan hasilnya kemudian dibahas dengan tim pusat. Penyelenggaraan tersebut ada baiknya diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali dan pada kesempatan ini juga dilangsungkan pameran benda-benda museum daerah/pusat. Dengan demikian dalam satu saat dan tempat yang sama berlangsung dua kegiatan tentang pengungkapan sejarah.
15. Untuk meningkatkan kesadaran sejarah dan pelajaran sejarah, maka mahasiswa jurusan sejarah diberikan beasiswa.

16. Begitu juga untuk meningkatkan perhatian atau minat pelajar pada sejarah agar diadakan diskusi antara mereka tentang topik atau masalah yang menyangkut kesejarahan. Dengan demikian mereka akan terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan ataupun sebagai pendengar.
17. Untuk membantu para guru dan murid dalam memahami buku-buku sejarah, terutama menyangkut pelajaran disediakan alat peraga. Dan disetiap sekolah supaya tersedia peta sejarah.
18. Untuk meningkatkan sejarah bagi masyarakat atau murid khususnya maka ditiap daerah dibuat diorama episode lokal, serial monografi dan laboratorium sejarah. Kemudian sering dilakukan pameran oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini ditangani oleh PSK dan kepada setiap penonton (murid) diharuskan membuat laporan tertulis. Selain itu PSK melaksanakan sayembara membuat gambar, patung, karangan, gambar-gambar tokoh dan peristiwa bersejarah.

Dalam kurikulum pelajaran sejarah dimasukkan kegiatan untuk melihat benda-benda bersejarah di museum ataupun mengadakan kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah.

19. Untuk mendapatkan gambaran akan aktivitas bangsanya maka perlu ditangani secara serius filem-filem sejarah. Dan agar murid diberi fasilitas untuk melihatnya seperti umpama Janur Kuning, November 1928 dan lain-lain.

Selain itu diterbitkan buku komik atau serial kaset dengan menampilkan dialog dari tokoh/pahlawan bangsa, juga naskah-naskah drama yang dapat dimainkan anak didik serta dapat menontonnya.

20. Peristiwa-peristiwa sejarah diperingati secara kontinyu disertai dengan uraian yang memadai.
21. Benda-benda sejarah agar dirawat dan dilestarikan dan di tingkat SMTA diberikan pelajaran dasar arkeologi.

22. Untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap daerahnya perlu didirikan monumen-monumen perjuangan untuk dapat dihayati oleh generasi muda sebagai penerus bangsa.

Sehubungan dengan itu maka nama tokoh atau pahlawan daerah dipakai sebagai nama-nama jalan di samping nama pahlawan nasional. Hal ini perlu demi penghayatan nilai-nilai perjuangan masa lampau.

23. Perkumpulan pemuda hendaknya dapat menunjukkan identitas bangsanya seperti yang telah dilakukan oleh pemuda pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo dan lain-lain. Dan di luar jam pelajaran para pelajar diarahkan pada kegiatan remaja seperti kepramukaan, wira-swasta dan lain-lain.
24. Tentang PSPB selain buku Tigapuluh Tahun Indonesia Merdeka supaya buku pedoman segera diterbitkan dan disebarkan ke daerah-daerah. Sehubungan dengan masalah ini alangkah baiknya bila dibuat filem yang dapat menggugah minat siswa seperti filem dokumen sejarah atau semacam slide pada pelajaran IPA.
25. Generasi muda perlu diperkenalkan dengan historiografi tradisional.

IV. Kesimpulan

1. Pada umumnya kesadaran sejarah di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pendidik masih sangat rendah. Hal ini karena guru kurang memiliki keterampilan mengajar sehingga tidak menarik bagi anak didik. Di samping itu kurang ditunjang oleh sumber-sumber referensi dan sarana penunjangpun kurang mendapat perhatian.
2. Untuk peningkatan pembinaan kesadaran sejarah, perlu ditingkatkan pengetahuan para guru, khususnya guru sejarah. Selain itu perlu juga diimbangi dengan ke-

lengkapan dan peningkatan sumber informasi, baik berupa buku sejarah Indonesia yang baru maupun artikel-artikel tentang kesejarahan beserta sarana penunjang seperti: peta Indonesia, peta sejarah, filem dokumenter, slide, poster-poster, diorama-diorama, gambar-gambar tokoh/pahlawan, peristiwa sejarah, filem cerita sejarah dan monumen-monumen perjuangan.

3. Di samping itu sebaiknya PSK sering mengadakan sayembara-sayembara seperti membuat gambar, patung, karangan, mengumpulkan gambar-gambar tokoh/pahlawan ataupun peristiwa sejarah dan lain-lain, serta sering mengadakan pameran-pameran.
4. Sehubungan dengan penjernihan sejarah masih banyak kelemahan-kelemahan yang mendasar baik pada buku paket maupun buku anjuran. Dan yang menjadi masalah serta mengganggu adalah perbedaan fakta atas peristiwa yang sama antara buku yang satu dengan buku yang lain. Di samping itu di daerah-daerah masih banyak masalah-masalah yang perlu dijernihkan.
5. Untuk melengkapi isi Sejarah Nasional maka hendaknya peristiwa di daerah yang bertaraf nasional mendapat tempat yang semestinya dalam lembaran Sejarah Nasional.

Lampiran 2

**HASIL RAPAT KERJA
PENYUSUNAN KERANGKA MASALAH
PEMBINAAN KESADARAN DAN PENJERNIHAN SEJARAH**

A. PENGANTAR

Rapat Kerja Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah, dari tanggal 27 s.d. 30 Desember 1984 di Cibogo; setelah mendengar, menanggapi, dan membahas :

- a. Pengarahan dari Direktur Jenderal Kebudayaan
- b. Pengantar Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional
- c. Diskusi Panel yang dipimpin oleh Dr. S. Budhisantoso, dengan panelis:
 - 1) Drs. Abdurachman Suryomihardjo
 - 2) Drs. Bambang Sumadio
 - 3) Drs. Bastomi Ervan
 - 4) Dr. Djoko Suryo
 - 5) Drs. Lapian, A.B.
 - 6) Dra. Nana Nurliana
 - 7) Dr. Taufik Abdullah
 - 8) Dr. Usman Pelly
- d. Makalah dan Pembahasan Hasil Pengumpulan data di Lapangan :
 - 1) Drs. Anhar Gonggong
 - 2) Dr. Ayatrohaedi
 - 3) Dr. Djoko Suryo
 - 4) Sutrisno Kutoyo
- e. Perumusan Hasil Rapat Kerja yang diadakan dari tanggal 3 s.d. 7 Mei 1984.

Maka dalam sidangnya yang terakhir tanggal 30 Desember 1984 menyimpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan :
(A) Pembinaan Kesadaran Sejarah, (B) Penjernihan Sejarah, dan (C) Langkah Kerja sebagai berikut :

B. PEMBINAAN KESADARAN SEJARAH

I. Pengertian

Pada tahap yang paling awal Kesadaran Sejarah adalah gambaran dan makna tentang masa lampau yang dianut suatu komunitas.

Dalam pengertian yang lebih mutakhir, kesadaran sejarah berarti gambaran dan makna tentang kenyataan bahwa manusia hidup dalam suatu konteks sosio-kultural dalam perspektif sejarah.

Pada pengertian yang pertama kesadaran sejarah sebagaimana sering digambarkan dalam berbagai historiografi tradisional merupakan bagian dari proses sosialisasi kultural, pada pengertian kedua, kesadaran sejarah tak terlepas dari pengetahuan kognitif. Dengan demikian kedua pengertian kesadaran sejarah itu lebih banyak berada dalam dimensi makna, dari pada dimensi kebenaran.

II. Kedudukan dan Fungsi Kesadaran Sejarah

Kesadaran sejarah berkedudukan sebagai landasan kontinuitas kultural dan integrasi nasional. Dengan kedudukan itu, kesadaran sejarah berfungsi sebagai :

- a. kerangka dalam memahami realitas lingkungan
- b. tolok ukur pandangan dunia yang wajar
- c. salah satu faktor yang memberi arah dan pembinaan harapan dari depan
- d. salah satu faktor pembentukan motif dalam pola tindakan.

III. Masalah

1. Adanya tiga corak "Kesadaran Sejarah", yaitu yang terbina oleh:
 - a. tradisi etnis-kultural
 - b. kesadaran religius yang melampaui batas-batas kultural

- c. Pengalaman bersama dalam hasrat integrasi nasional.
- 2. Kedudukan kesadaran sejarah sebagai landasan kontinuitas kultural dan integrasi nasional memungkinkan terjadinya pembenturan:
 - a) di antara ketiga corak kesadaran sejarah tersebut dan
 - b) antara dimensi makna dan dimensi kebenaran.

IV. Tujuan Pembinaan Kesadaran Sejarah

- a. Tanpa mengingkari pentingnya keragaman corak kesadaran sejarah yang bersifat tradisional dan religius, pembinaan kesadaran sejarah diutamakan bagi usaha pemupukan integrasi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. Bertolak dari pemahaman tentang masa lampau, pembinaan kesadaran sejarah ditujukan membina kesadaran kehidupan dalam konteks sosio-kultural yang historis dan dinamis, untuk memperoleh makna dan kearifan sejarah.
- c. Usaha menganalisa khasanah pengetahuan berbagai corak kesadaran sejarah komunitas-komunitas etnis dan religius akan:
 - 1) lebih memungkinkan kita untuk merumuskan strategi sosio-kultural yang lebih akurat dalam pembangunan nasional,
 - 2) menumbuhkan saling mengerti dan saling menghargai antar komunitas, dan
 - 3) meniadakan atau setidaknya memperkecil pengaruh stereotip-stereotip negatif.

C. PENJERNIHAN SEJARAH

I. Pengertian

Penjernihan sejarah ialah upaya memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam karya sejarah, mengisi kekosongan

dalam pengetahuan sejarah, dan mengembalikan kelampauan pada konteks sejarahnya dengan membedakan realitas dari mitos.

II. Sasaran

Dalam melakukan penjernihan, perlu diperhatikan beberapa masalah:

1. Kemungkinan adanya distorsi fakta karena:
 - a) kurangnya informasi yang ditemukan, sehingga
 - (1) hal-hal yang mendasar dalam sejarah seperti apa, siapa, bila dan dimana tidak lengkap, dan keutuhan rekonstruksi sejarah menjadi terganggu.
 - (2) munculnya hal-hal yang bersifat kontroversial dalam sejarah, sehingga fakta sejarah yang telah umum diterima masyarakat (accepted history) mulai dipertanyakan.
 - (3) adanya peniadaan dan pemalsuan fakta sejarah untuk tujuan-tujuan tertentu.
 - b) Anakronisme dalam fakta sejarah sebagai akibat terkacaukannya dimensi waktu dalam pemakaian fakta. Hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan, seperti:
 - (1) terkacaukannya hubungan kausalitas antara sesama fakta.
 - (2) peristiwa dapat dianggap terjadi dalam konteks pelembagaan sosioal-ekonomis yang berbeda.
 - (3) rekonstruksi peristiwa yang tidak utuh dan terpenggal-penggal, atau terjadinya kekacauan dalam *apa, siapa, di mana, dan bila* dari peristiwa.
2. Kemungkinan adanya tafsiran yang salah dalam karya sejarah sebagaimana dapat dilihat dalam :

- a) anakronisme tafsiran, yakni memakai realitas sekarang (baik dari sudut nilai, norma, maupun situasi) dalam menerangkan masa lampau;
 - b) ketidak-ajegan (inkonsistensi) yakni tidak terdapatnya keutuhan logika dalam usaha menerangkan peristiwa sejarah;
 - c) terlepasnya analisa dan tafsiran dari kenyataan faktual akibat keinginan normatif yang berlebihan dalam usaha menerangkan sejarah; hasrat ideologisasi menyebabkan sejarah dipakai sebagai alat pembenaran ideologi yang dianut;
 - d) kedangkalan dan kerancuan dalam penerapan konsep-konsep dan wawasan teoritik.
3. Kemungkinan adanya mitologisasi dalam karya sejarah, yakni proses terjadinya pencampuran peristiwa sebagai realita dengan nilai-nilai sosio-kultural. Proses ini bisa juga mengambil bentuk ketika nilai-nilai diaktualkan sebagai fakta sejarah.

Mitologisasi ini terjadi karena :

- a) peristiwa atau tokoh penting bagi kehidupan suatu masyarakat tidak terekam dengan baik;
- b) pengalaman masa lampau yang tidak terekam baik dijadikan pegangan bagi masa kini; dan
- c) sejarah dipakai sebagai pembenaran tata sosial yang berlaku.

Dalam konteks masyarakat modern dan yang sedang mengalami transisi, mitologisasi dapat terjadi dalam penggambaran tokoh dan rekonstruksi peristiwa.

III. Usaha-usaha yang dapat dilakukan

Penjernihan sejarah dapat dilaksanakan dengan :

- 1. penggalian sumber-sumber baru, dan
- 2. kritik sumber (baik lama maupun baru)
- 3. penjernihan konsep-konsep sejarah secara tepat dan pada tempatnya.

4. peningkatan mutu penulisan dan penerbitan, sesuai dengan lingkungan pembaca.

D. LANGKAH KERJA

Untuk langkah kerja empat tahun mendatang, disarankan agar Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah dapat dipertimbangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan telaah ulang pada buku-buku teks dan karya kesejarahan lainnya (seperti: lukisan, patung, film, diorama dan lagu) yang beredar di masyarakat.
2. Menyusun dan menerbitkan buku pegangan dan kamus sejarah.
3. Menerbitkan media berkala untuk menyebarluaskan informasi aktual tentang sejarah serta menjalin hubungan dan kerjasama dengan media komunikasi lain untuk menanamkan kesadaran sejarah.
4. Melakukan identifikasi dan penafsiran terhadap lambang-lambang pemerintah daerah tingkat I dan II seluruh Indonesia sebagai salah satu usaha untuk mengetahui pola-pola kesadaran sejarah yang telah dirumuskan.
5. Melakukan pembinaan kesadaran sejarah dan penulisan khusus untuk daerah-daerah tertentu, seperti Timor-Timur dan Irian Jaya.
6. Melakukan pengumpulan data untuk mengetahui tingkat, keluasan cakrawala, dan persepsi kesadaran sejarah di dalam masyarakat, baik di tingkat Sekolah Dasar, SMTP, SMTA, mahasiswa dan masyarakat umum.
7. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.
8. Menyelenggarakan pertemuan dengan penulis-penulis kesejarahan.

Cibogo, 30 Desember 1984

**Tim Perumus Penyusunan Konsep Pembinaan
Kesadaran dan Penjernihan Sejarah**

Ketua	:	Dr. S. Budhisantoso
Wakil Ketua	:	Dr. Taufik Abdullah
Sekretaris	:	Dr. Mukhlis
Anggota	:	Drs. Abdurachman Suryomihardjo
		Drs. Anhar Gonggong
		Dr. Ayatrohaedi
		Drs. Bambang Sumadio
		Drs. J.R. Chaniago
		Dr. Djoko Suryo
		Dr. Kuntowijoyo
		Drs. A.B. Lopian
		Dr. Usman Pelly

